



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**Nama: RENNY ANALISA DWI PUTRI****NIM: 145120407121010**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Kebijakan Amerika Serikat terhadap Selandia Baru melalui *Washington Declaration On Defense* Pada Tahun 2012** adalah betul betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, Juli 2018

Yang membuat pernyataan

Renny Analisa Dwi Putri

NIM. 145120407121010

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP SELANDIA
BARU MELALUI *WASHINGTON DECLARATION ON DEFENSE* PADA
TAHUN 2012**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

RENNY ANALISA DWI PUTRI
NIM: 145120407121010

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam ujian Komprehensif tanggal 19 Juli
2018

Tim Penguji

Ketua Majelis Penguji



Ni Komang Desy S A P, S.IP., MSI

NIK. 2011028412302001

Sekretaris Majelis Penguji



Mely Noviryani, S.Sos., MM

NIK. 2007077409112001

Anggota Majelis Penguji I



Henny Rosalinda, S. IP., M.A

NIP.197908082014042001

Anggota Majelis Penguji II



Joko Purnomo S. IP., M.A

NIP.19780401209121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak

NIP. 196908141994021001



HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP SELANDIA
BARU MELALUI *WASHINGTON DECLARATION ON DEFENSE* PADA**

TAHUN 2012

SKRIPSI

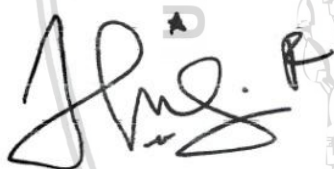
Disusun Oleh:

RENNY ANALISA DWI PUTRI

NIM: 145120407121010

Telah disetujui oleh dosen pembimbing:

Pembimbing Utama



Henny Rosalinda, S. IP., M.A
NIP.197908082014042001

Pembimbing Pendamping



Joko Purnomo S. IP., M.A
NIP.19780401209121002

Tanggal: Tanggal:

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional



Aswin Ariyanto Azis., S. IP., M. Devst
NIP197802202012121001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi hasil yang lebih baik.

Pada akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi penulis khususnya dan rekan-rekan mahasiswa pada umumnya.

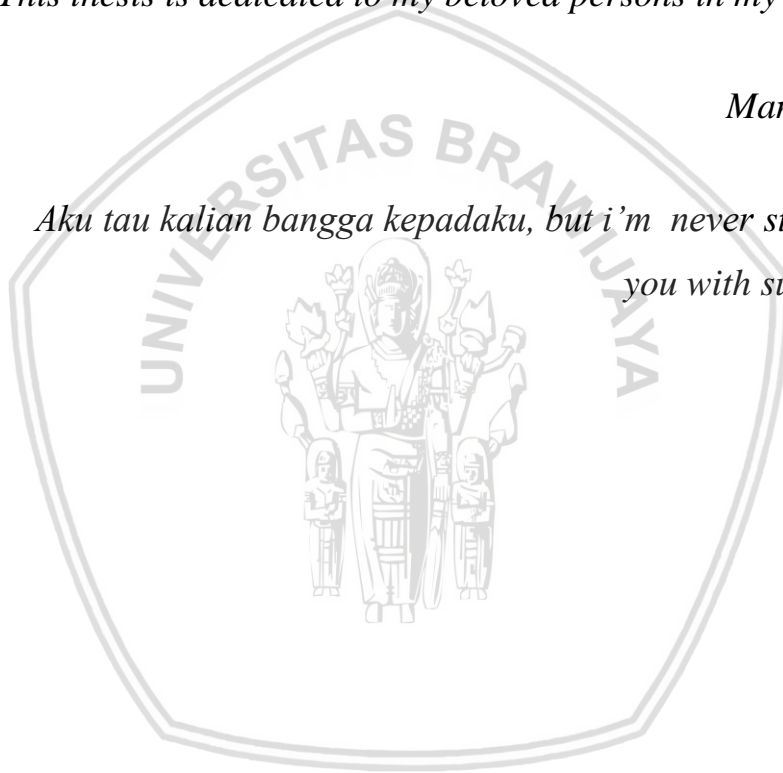
Malang, Juli 2018

Renny Analisa Dwi Putri

This thesis is dedicated to my beloved persons in my whole life:

Mama & Ayah

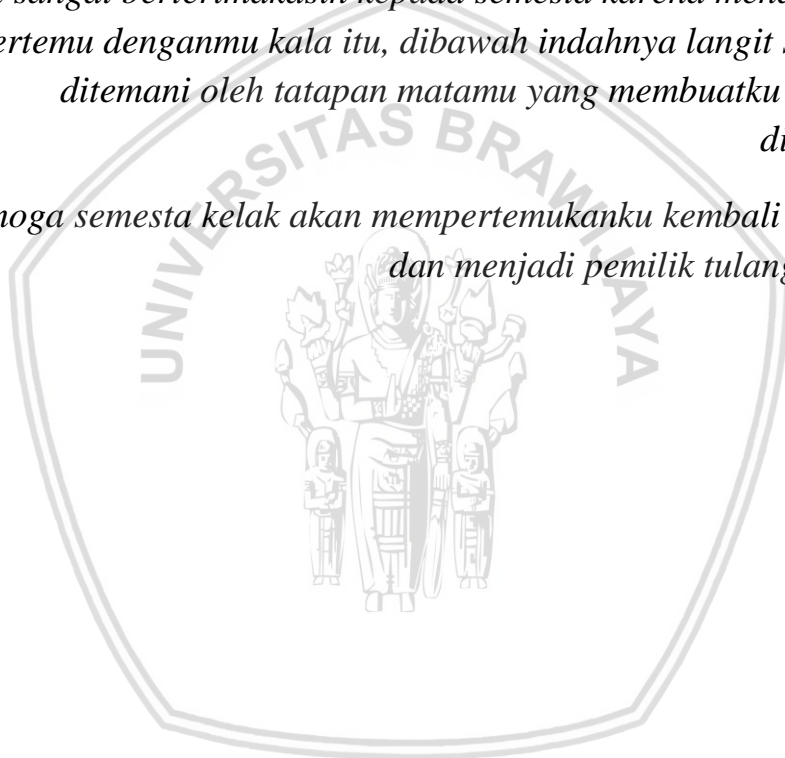
*Aku tau kalian bangga kepadaku, but i'm never stop to spoil
you with successness.*



Untuk Abdul Mateen Bolkiah

*Aku sangat berterimakasih kepada semesta karena menakdirkanmu
bertemu denganmu kala itu, dibawah indahnya langit senja serta
ditemani oleh tatapan matamu yang membuatku tenggelam
didalamnya.*

*Semoga semesta kelak akan mempertemukanku kembali denganmu
dan menjadi pemilik tulang rusukmu.*



LEMBAR PERSEMBAHAN

Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin, terimakasih kepada Tuhanku Allah SWT yang selalu mendengarkan doaku selama ini. Entah bagaimana caraku bersyukur karna mengetahui setiap lantunan doaku terjamah oleh-Nya, terutama doa tentang pendidikanku. Pada awal 2014 aku meminta agar menjadi mahasiswa HI dan Ia mendengarku dengan diterimanya aku sebagai mahasiswa HI angkatan 2014, saat berkuliah aku bermimpi agar nilaiku selalu baik dan memuaskan, alahngkah bahagianya karna hal tersebut juga didengar oleh Allah. Aku selalu berdoa agar dapat lulus tepat waktu dan Ia pun tetap mendengarku dengan membantu memudahkan urusanku dalam menyusun skripsi ini dari awal. Nikamt Tuhan mana lagi yang bisa kau dustakan? Syukur dan bangga sekali rasanya dapat menyelesaikan pendidikanku di bangku perkuliahan dengan menyelesaikan skripsi ini yang jauh dari kata sempurna tapi aku dapat melakukannya dengan bantuan Allah serta beberapa pihak yang membantuku, aku ucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Henny Rosalinda, sebagai pembimbing utamaku dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas bimbingan, nasihat dan kepercayaan Bu Henny kepada aku.
2. Pak Joko Purnomo, sebagai pembimbing II yang juga selalu percaya kepadaku, membantuku dan menginspirasi dari ujian sempro hingga kompre. Terimakasih selalu menghargai setiap usahaku.
3. Ibu Ni Komang Desy, sebagai Ketua Majelis Penguji kompreku yang memberikan masukan dan dukungan yang sangat berarti dalam skripsi ini.

4. Ibu Mely Noviryani, sebagai sekretaris penguji serta Ketua Lab HI yang selalu percaya kepada setiap pekerjaanku dan selalu membimbingku. Terimakasih banyak bu Mely telah percaya kepadaku untuk jadi ASLAB dan ASPEN yang memberikanku banyak pengetahuan dan pengalaman.
5. Untuk keluagaku dirumah terutama untuk Mbak Ika dan Tatum serta Zoro yang selalu memberikan dukungan finansial dan moril :3 serta menyemangatiku untuk segera menyelesaikan skripsiku.
6. Mbak Qoqon, Kroco Pribadiku, Mbak Vhyvi, Mbak Audy, Yayam dan Jathu, makasih gengs uda nemeni aku dari semester satu sampek aku lulus aku terharu hehehe, syukur punya sahabat seperti kalian whic is i cant discribe how lucky i am to have you gusys! Cheers and always keep in touch yaw.
7. Untuk keluarga arab dan kesultanan, Esyege, Anakku Fara, Delboy, Richa, Anggun, Bintang, Pras, Fitri makasih ya uda mau menghabiskan kekayaanku sebagai keluarga Arab.
8. Buat Mayang Delima dan Zenita, you guys so rock hahaha kuylah setelah ini kita jalan- jalan, moga kalian cepet nyusul ya.
9. Buat temen kelas Inggris (I-HI 14) I LOVE YOU GUYS! Kalian temen kelas terbaik akuhh dari semester satu sampek semester delapan sekelas terus, makasih uda selalu baik ke aku ya gengs semoga kita bisa reunian kelak hehehe

10. Buat Pak Dadang , Mbak Dita, Mas Saiful dan Mas Andy makasih banyaak tanpa informasi kalian apalah art aku dan skripsi ini . Makasih udah bantuin dan mau direpotin buat nanya keberadaan dosen hehehe
11. Buat Rizky Amalia, temen SMA ku yang punya peran signifikan dalam skripsi ini heheh, makasih uda bantuin minjem bujunya om Kegley dari perpustakaan UI, makasih banyak.
12. Last for my precious one, Keriwil thank you so much bebeh , thank you for always be there for me, nganter kemana – mana gapernah mengeluh dan rela di omelin hehehe. Cepetan kelarin kuliahnya ya jangan sampek aku kelamaan nunggu kamu wisuda. I love you willy. (boong ding heheh)
13. Dan untuk semua pihak yang membantuku dalam mengerjakan skripsi ini e.g: mas- mas tukang fotokopi FISIP, mas Ojol, dan temen – temen yang selalu berbagi informasi ke aku, makasih ya kalian, walaupun kalian gabakal baca ini tapi aku sangat bersyukur baut ketemu kalian.

Love,

Renny Analisa

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	2
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	5
LEMBAR PERSEMBAHAN	8
DAFTAR ISI.....	11
DAFTAR TABEL.....	14
DAFTAR GRAFIK.....	15
DAFTAR GAMBAR.....	16
DAFTAR LAMPIRAN.....	17
DAFTAR SINGKATAN	18
ABSTRAKSI	19
ABSTRACT.....	20
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
1.3 Manfaat Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1 Studi Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Kajian Konseptual.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Kebijakan Luar Negeri	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Konsep <i>Foreign Policy Analysis</i>	Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Operasionlisasi Konsep	Error! Bookmark not defined.
2.2.4 Alur Pemikiran.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Argumen Utama.....	Error! Bookmark not defined.

BAB III	Error! Bookmark not defined.
METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
3.1 Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Ruang Lingkup.....	Error! Bookmark not defined.
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.4 Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
GAMBARAN UMUM	Error! Bookmark not defined.
HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT – SELANDIA BARU	Error! Bookmark not defined.
4.1 Kerja sama Militer dan Pertahanan Amerika Serikat – Selandia Baru	Error! Bookmark not defined.
1. <i>Australia, New Zealand, United State Security Treaty (ANZUS)</i>	Error! Bookmark not defined.
2. <i>Operation Enduring Freedom</i>	Error! Bookmark not defined.
3. <i>Wellington Declaration</i>	Error! Bookmark not defined.
4. <i>Washington Declaration</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
ANALISIS KEBIJAKAN KEAMANAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP SELANDIA BARU MELALUI <i>WASHINGTON DECLARATION ON DEFENSE</i> PADA TAHUN 2012.....	Error! Bookmark not defined.
5.1 Feedback	Error! Bookmark not defined.
5.2 Global Condition.....	Error! Bookmark not defined.
5.2.1 <i>Global Trend</i>	Error! Bookmark not defined.
5.2.1.1 Bencana Alam.....	Error! Bookmark not defined.
5.2.1.2 Terorisme.....	Error! Bookmark not defined.
5.1.2 Polarisasi.....	Error! Bookmark not defined.
5.1.3 Posisi Geo strategi	Error! Bookmark not defined.
5.2 Internal Characteristics	Error! Bookmark not defined.
5.2.1 Kapabilitas Militer	Error! Bookmark not defined.
5.2.2 Kondisi Ekonomi	Error! Bookmark not defined.
5.2.3 Bentuk Pemerintahan	Error! Bookmark not defined.
5.3 Actor Leadership.....	Error! Bookmark not defined.

BAB VI.....	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
6.1 Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
6.2 Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	36
Operasionalisasi Konsep <i>Foreign Policy Analysis</i>	36
Tabel 2.....	36
Kebijakan Pertahanan Amerika Serikat Dengan Selandia Baru dalam Indikator <i>Foreign Policy Analysis</i>	36



DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1	72
-----------------------	-----------

Jumlah Pengeluaran Anggaran Pertahanan Amerika Serikat	72
--	----

GRAFIK 2	78
-----------------------	-----------

Tingkat economic freedom di Amerika Serikat	78
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	28
“Funnel Vission”atau Faktor yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan	28
Gambar 2	65
Peta Persebaran <i>Human Trafficking</i> dan <i>People Smuggling</i> di Kawasan Pasfik	65
GAMBAR 3	75
Struktur Komando Pangkalan Militer Amerika Serikat	75
GAMBAR 4	86
Pembagian Kekuasaan di Amerika Serikat	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	114
<i>Wellington Declaration</i>	<i>114</i>
Lampiran 2	116
<i>Washington Declaration on Defense.....</i>	<i>116</i>



DAFTAR SINGKATAN

ANZUS	: <i>Australia New Zealand United State</i>
AS	: Amerika Serikat
APEC	: <i>Asia – Pacific Economic Cooperation</i>
ASEAN	: <i>Association of South East Asian Nations</i>
CND	: <i>Campaign for Nuclear Disarmament</i>
CNN	: <i>Cable News Network</i>
FDI	: <i>Foreign Direct Investment</i>
FTA	: <i>Foreign Trade Agreement</i>
FEMA	: <i>Federal Emergency Management Agency</i>
ICJ	: <i>International Court of Justice</i>
NATO	: <i>North Atlantic Trade Organization</i>
NAFTA	: <i>North American Free Trade Agreement</i>
OEF	: <i>Operation Enduring Freedom</i>
PBB	: Persatuan Bangsa- bangsa
PDC	: <i>Pacific Disaster Center</i>
SB	: Selandia Baru
TPP	: <i>Trans Pacific Partership</i>
USPACOM	: <i>United StatePacific Command</i>
WOT	: <i>War on Terror</i>
WTC	: <i>World Trade Center</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

ABSTRAKSI

Hubungan aliansi Amerika Serikat dan Selandia Baru terputus sejak tahun 1984 ketika Selandia Baru menerapkan kebijakan anti nuklir dibawah kepemimpinan Perdana Menteri David Lange yang menolak izin kapal U.S.S Buchanan milik Amerika Serikat untuk berlabuh di perairan Selandia Baru. Semenjak saat itu Amerika Serikat menanggihkan keanggotaan Selandia Baru dalam Aliansi ANZUS. Konflik pun berlalu, hubungan Amerika Serikat dan Selandia Baru yang hampir 30 tahun tidak harmonis akhirnya membaik pada tahun 2000-an namun kedua negara tidak menjalin hubungan yang formal, hingga akhirnya kedua negara memutuskan untuk melakukan dialog politik pada tahun 2010 bernama *Wellington Declaration*. Dan pada tahun 2012 Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Obama memutuskan untuk menjalin kembali hubungan Amerika Serikat dan Selandia Baru dengan dikeluarkannya kebijakan *Washington Declaration on Defense*. Penulis menggunakan konsep *foreign policy analysis* Charles William Kegley untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Amerika Serikat dalam membuat kebijakan *Washington Declaration on Defense* terhadap Selandia Baru. Penulis menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi Amerika Serikat dalam membuat kebijakan *Washington Declaration on Defense* dengan menggunakan konsep Charles William Kegley adalah *Feedback*, *Global Condition*, *Internal Characteristics*, dan *Actor Leadership*.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Selandia Baru, ANZUS, *Wellington Declaration*, *Washington Declaration on Defense*, Charles W Kegley.

ABSTRACT

Relations between United State and New Zealand changed in the 1980's, when New Zealand's implementation of a policy barring nuclear – armed and nuclear powerd warship from its ports, this policy issued under Prime Minister David Lenge era who refused to give permission of U.S.S Buchanan to dock in New Zealand's sea. Hence, since 1986 United State suspended its ANZUS security obligations to New Zealand. After 30 years both country finally build a good relations in 2000's without formal relation, until in 2010 they signed a politcal dialogue named Wellington Declaration. And in 2012 United State under Obama's leadership decided to enhanced Untited State and New Zealand relations under *Washington Declaration on Defense* policy. In this thesis author use *foreign policy analysis* concept by Charles William Kegley to analyze the factors that affected United State in issued *Washington Declaration on Defense* policy toward New Zealand. Using Kegley's concept Author find that factors which ifluence United State in issued *Washington Declaration on Defense* are Feedback, Global Condition, Internal Characteristics, and Actor Leadership .

Keywords: United State, New Zealand, ANZUS, *Wellington Declaration*, *Washington Declaration on Defense*, Charles W Kegley

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketika Perang Dingin terjadi tatanan sistem dunia terbagi menjadi dua kekuatan besar yaitu blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, yang bersaing untuk menyebarkan ideologi-ideologi yang mereka anuti.¹ Dalam mencegah pengaruh Soviet ke negara lain khususnya di wilayah Pasifik, Amerika Serikat berupaya membentuk sebuah aliansi bersama Australia dan Selandia Baru yang bernama ANZUS (*Australia – New Zealand – United State*) aliansi ini dibentuk pada tahun 1951 di San Francisco.² Tujuan dari dibentuknya ANZUS adalah untuk mencegah pengaruh komunisme dari para sekutu Uni Soviet seperti China yang pada saat itu tengah bangkit dalam menyebarkan paham komunisme dan bangkitnya Jepang yang menyebarkan pengaruhnya ke negara – negara Asia dan Pasifik, selain itu tujuan lain dibentuknya ANZUS adalah untuk mengadakan perjanjian keamanan dan pertahanan antar anggota aliansi melalui kerja sama di bidang militer yang berbasis *collective defense*.³

Hubungan Amerika Serikat dan Selandia Baru semakin erat semenjak adanya ANZUS, terutama bagi Selandia Baru karena setelah bergabung dengan

¹Office of The Historian of Unites State.”*The Australia, New Zealand and United States Security Treaty (ANZUS Treaty), 1951*”. Diakses pada tanggal 18 Januari 2018 dari: <https://history.state.gov/milestones/1945-1952/anzus>

² *Ibid.*

³ Rolfe, Jim.”*New Zealand Securit; Alliance and Other Military Relationship, Working Paper Centre fro Strategic Studies*”. Victoria University of Wellington, No 10/1997. Halaman 8

aliansi tersebut mengubah pandangan dan arah kebijakan Selandia Baru terbukti pada saat Selandia Baru untuk pertama kalinya mengirimkan pasukan militernya untuk membantu Amerika Serikat dalam *proxy war* di Korea dan Vietnam. Pada saat itu Selandia Baru tidak mengatas namakan dirinya sebagai sekutu Inggris, melainkan sebagai sekutu Amerika Serikat.⁴

Namun hubungan antara Amerika Serikat dan Selandia Baru merenggang pada tahun 1980-an. Hal ini dikarenakan ketika David Lange terpilih menjadi Perdana Menteri Selandia Baru di tahun 1984, Selandia Baru mengalami perubahan tentang kebijakan keamanan negaranya, dimana pada masa Pemerintahan David Lenge, beliau sangat fokus untuk menjadikan Selandia Baru sebagai negara anti nuklir.⁵ Persoalan semakin memanas ketika Pemerintah Selandia Baru menolak Amerika Serikat yang meminta izin agar kapal angkatan laut U.S.S. Buchanan untuk berlabuh di perairan Selandia Baru, karena kapal tersebut dianggap dapat berpotensi membawa nuklir dan bertentangan dengan fokus kebijakan Selandia Baru yang sangat menggalakkan kebijakan anti-nuklir.⁶

Oleh sebab itu, pada tahun 1987 pemerintah Selandia baru mengeluarkan kebijakan untuk melarang masuknya kapal-kapal yang memiliki kapabilitas atau berpotensi nuklir.⁷ Kebijakan anti nuklir yang di gencarkan oleh Selandia baru tersebut berimplikasi terhadap kelanjutan hubungan kerja sama antara Selandia Baru dan Amerika Serikat, dimana Amerika Serikat melepaskan kewajibannya

⁴Catalinac, Amy L.(2010). "Why New Zealand Took Itself out of ANZUS: Obeserving Opposition for Autonomy in Asymmetric Alliance" dalam *Foreign Policy Analysis*, Vol. 6. Halaman 318

⁵US-NZ Council."History of US – NZ Relations"**Diakses pada tanggal** 18 Januari 2018 **dari:** <http://usnzcouncil.org/us-nz-issues/us-nz-relations/>

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

untuk melindungi Selandia Baru dalam aliansi ANZUS. Hal disebut dibuktikan dengan adanya keputusan Amerika Serikat yang membatalkan latihan militer “*Sea Eagle*” bersama Selandia Baru yang akan diadakan pada tahun 1985, Amerika Serikat juga melarang kapal – kapal militer Selandia Baru untuk memasuki seluruh pelabuhan yang ada di Amerika Serikat.⁸

Seiring berjalannya waktu ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Selandia Baru semakin membaik ketika kedua negara memiliki peran dan dukungan yang sama dalam mengatasi konflik internasional di pertengahan tahun 1990-an seperti; krisis di Somalia pada tahun 1992 hingga 1995 dimana kedua negara bersama – sama membantu menghentikan kelaparan dan perang saudara di Somalia di bawah mandat PBB; Amerika Serikat dan Selandia Baru juga melancarkan upaya menjaga perdamaian dunia di Bosnia pada tahun 1992 – 2007 dengan mengirimkan tentara militer; dan juga kedua negara memiliki peran dalam mengatasi Perang Teluk antara Irak dan Kuwait pada tahun 1990-1991 dengan misi *naval interception missions*. Bukan hanya itu saja, pada tahun 2001 setelah Amerika Serikat mendapatkan serangan terorisme 9/11, President Bush mengubah arah kebijakan keamanan Amerika Serikat untuk fokus memerangi terrorism. Kebijakan tersebut lalu di dukung oleh Pemerintahan Selandia Baru dengan turut berkontribusi membantu Amerika Serikat dalam krisis di

⁸ Office of The Historian of Unites State, *Loc. cit*

Afghanistan, dimana tim rekonstruksi dan pasukan khusus Selandia Baru mendapatkan apresiasi dari Amerika Serikat.⁹

Memasuki masa pemerintahan Presiden Obama, Amerika Serikat memulai dinamika kerja sama baru dengan Selandia Baru dimana pada tahun 2010 Obama mengundang Selandia Baru untuk mendatangi Konferensi Tingkat Tinggi keamanan nuklir, dari pertemuan tersebut kedua negara juga membahas mengenai upaya meningkatkan kerja sama keamanan dan pertahanan antara Amerika Serikat dan Selandia Baru yang berbeda dari kerangka ANZUS. Upaya tersebut lalu direalisasikan dengan adanya komitmen antara Amerika Serikat dan Selandia Baru untuk mendatangi *Wellington Declaration*, dari pertemuan tersebut kedua negara juga membahas mengenai upaya meningkatkan kerja sama keamanan dan pertahanan antara Amerika Serikat dan Selandia Baru yang berbeda dari kerangka ANZUS.

Dua tahun setelahnya Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan luar negeri kepada Selandia Baru yang tertuang dalam *Washington Declaration*, dokumen tersebut berisi tentang kerangka kerja sama antar kedua negara melalui Departemen Keamanan dan Pertahanan dari masing-masing negara. Dengan adanya kebijakan *Washington Declaration* diharapkan Amerika Serikat dan Selandia Baru dapat menjaga dan mempererat hubungan antar negara di ranah pertahanan, menyediakan mekanisme untuk mengidentifikasi dan

⁹ Ayson, Robert and Jock Phillips.(2012). " *United States and New Zealand - Improving relations, 1990–2011* " **Diakses pada tanggal** 18 Januari 2018 **dari:** Te Ara - the Encyclopedia of New Zealand, <http://www.TeAra.govt.nz/en/united-states-and-new-zealand/page-4>

mengimplementasikan bidang baru dalam kerja sama pertahanan serta membentuk zona pertahanan baru antara kedua negara.¹⁰

Kebijakan *Washington Declaration on Defense* dibentuk atas respons Pemerintah Amerika Serikat terhadap kebangkitan China yang pada saat itu menyebarkan pengaruhnya di kawasan Pasifik. Oleh sebab itu, Amerika Serikat menanggapi kebijakan tersebut dengan menjadikan kawasan Pasifik sebagai pivot geo strateginya dan menjalin kerja sama dengan negara-negara pasifik salah satunya dengan Selandia Baru.¹¹ Selain itu kebijakan *Washington Declaration on Defense* juga di latar belakang oleh isu lingkungan, dimana kedua negara akan bersama – sama bekerjasama dala menanggulangi bencana alam, hal ini dikarenakan baik Amerika Serikat dan Selandia Baru adalah negara yang dikelilingi oleh samudera Pasifik, sehingga jika kedua negara tidak bekerja sama dalam mengamankan kawasan pasifik, terutama dari isu bencana alam, maka kedua negara akan mendapatkan kerugian yang besar salah satunya adanya angka imigran yang tinggi. Dalam kebijakan *Washington Declaration on Defense*, kedua negara sepakat untuk bekerja sama di bidang keamanan maritim, hal ini dikarenakan Amerika Serikat melihat kuatnya pertahanan maritim dari Selandia Baru yang memiliki wilayah maritim terluas di dunia dan Selandia Baru juga merupakan negara *periphery* yang kuat di kawasan Pasifik.¹²

¹⁰ Ayson, Robert & David Capie.(2012). “ *Part of the Pivot? The Washington Declaration adn US – NZ Relations*”. Halaman 1

¹¹ Vaughn, Bruce. (2012). “The United States and New Zealand: Perspectives on a Pacific Partnership”. Full Bright: New Zealand. Halaman 17

¹² Powles, Anna. “ *Finding Common Ground: New Zealand and Regional Security Cooperation in the Pacific*”. APCSS. Halaman 92

Dinamika hubungan AS dan SB sangat menarik bagi penulis. Awalnya kedua negara menjalin hubungan aliansi yang intense dalam ANZUS pada saat Perang Dingin terjadi. Kemudian hubungan antara kedua negara mengalami perubahan saat Selandia Baru mengeluarkan kebijakan *nuclear free zone*, dimana kebijakan tersebut membuat SB melakukan penolakan kepada kapal U.S.S Buchanan milik AS. Akibat adanya penolakan tersebut berimplikasi terhadap kewajiban AS dalam melindungi keamanan Selandia Baru. Hingga pada akhirnya kedua negara menginisiasikan dialog politik pada tahun 2010 bernama *Wellington Declaration*, yang merupakan gerbang utama dari dibentuknya *Washington Declaration* pada tahun 2012 dan menghasilkan sebuah perjanjian formal kedua negara selama hampir 30 tahun tidak pernah melakukan kerja sama di bidang keamanan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisa dan memberikan deskripsi tentang alasan Amerika Serikat dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri terhadap Selandia Baru dalam sebuah penelitian yang berjudul : “*Analisis Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Selandia Baru Melalui Washington Declaration On Defense Pada Tahun 2012*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan penelitian sebagai berikut : “Apa yang melatarbelakangi Amerika Serikat dalam mengeluarkan kebijakan *Washington Declaration On Defense* pada tahun 2012?”

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi Amerika Serikat dalam mengeluarkan kebijakan pertahanan *Washington Declaration On Defense* terhadap Selandia Baru.
2. Untuk mengetahui bagaimana dinamika hubungan antara Amerika Serikat – Selandia Baru dari tahun 2000 hingga 2012.
3. Untuk menganalisa Kebijakan Pertahanan Amerika Serikat berdasarkan konsep *Foreign Policy Analysis*.

1.3 Manfaat Penulisan

1. Dapat memberikan informasi mengenai kebijakan luar negeri yang disinergikan dengan kerja sama pertahanan sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan suatu kebijakan.
2. Dapat memberikan masukan terkait upaya atau kebijakan suatu negara yang diaplikasikan dalam bentuk kerja sama pertahanan.
3. Sebagai masukan yang dapat dipertimbangkan bagi peneliti Hubungan Internasional khususnya di bidang *International Security and Peace* untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Terdahulu

Studi terdahulu pertama yang penulis jadikan pijakan dalam penelitian ini adalah sebuah penelitian dari Amy L. Catalinac yang berjudul *Why New Zealand Took Itself out of ANZUS: Observing "Opposition for Autonomy" in Asymmetric Alliance*. Penelitian tersebut membahas mengenai analisis dibalik kebijakan Selandia Baru dalam mengeluarkan kebijakan *non-nuclear*. Pada saat itu muncul banyak pertanyaan mengapa New Zealand berani untuk menolak permintaan Amerika Serikat dan merelakan hubungan aliansi yang telah dijalin selama lebih dari satu dekade. Dalam menjawab pertanyaan tersebut Amy L. Catalinac menganalisisnya menggunakan konsep *Balance of Interest* yang akan menjelaskan dinamika hubungan aliansi antara negara kecil dan negara besar, seperti ANZUS. Dalam penelitian tersebut, Amy menarik empat hipotesis mengenai alasan Selandia Baru mengeluarkan kebijakan *non-nuclear* yaitu: *free riding*, *hedging against entrapment*, *soft balancing*, dan *autonomy concern*. Dari keempat hipotesis tersebut Amy L. Catalinac menyimpulkan bahwa Selandia Baru memiliki keinginan untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar atau "*autonomy concern*" dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri.¹

Dalam penelitian tersebut Amy L. Catalinac juga menjelaskan kemunduran kapabilitas militer semenjak Selandia Baru berhenti bekerja sama

¹ Catalinac, Amy L. *Loc.cit.* Halaman 320-325

dengan Amerika Serikat. Di bidang ekonomi juga mengalami kemunduran, karena pasca Selandia Baru mengeluarkan kebijakan *non-nuclear* Amerika Serikat sempat me embargo peredaran ekspor dan impor antara kedua negara, namun kebijakan tersebut hanya berlaku sementara.²

Alasan penulis menggunakan penelitian Amy L. Catalinac yang berjudul *Why New Zealand Took Itself out of ANZUS: Observing "Opposition for Autonomy" in Asymmetric Alliance* adalah karena penelitian tersebut sama –sama menguji tentang hubungan Amerika dan Selandia Baru yang merenggang akibat kebijakan *non – nuclear* dari Selandia Baru tahun 1985. Namun penelitian karya Amy L. Catalinac lebih membahas dan fokus terhadap analisis kebijakan Selandia Baru dalam mengeluarkan kebijakan *non – nuclear* dengan menggunakan teori *Balance of Interest*, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan lebih fokus dalam menganalisa kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat yang bernama *Washington Declaration on defense* dengan menggunakan konsep *Foreign Policy Analysis* milik Charles W. Kegley.

Studi terdahulu kedua adalah sebuah penelitian karya Nils Knudsen Vardam yang berjudul *U.S. foreign policy decision-making during the wars in Georgia and Ukraine*. Penelitian tersebut Nils Knudsen Vardam membahas dan menganalisis tentang perubahan kebijakan keamanan Amerika Serikat terhadap konflik di Rusia dan Georgia pada tahun 2008 dan dalam konflik aneksasi Russia di Krimea pada tahun 2014 menggunakan konsep *Foreign Policy Analysis* miliki Charles W. Kegley, dimana ia akan menganalisis kebijakan tersebut dengan

² *Ibid.*

menggunakan empat faktor yaitu *global condition*, *internal characters*, *leader*, dan *feedback*. Nils Knudsen menjelaskan bahwa Kebijakan Amerika pada saat krisis Georgia sangat intense karena Amerika mengancam Russia dengan memberikan hukuman militer yang berat, sedangkan pada saat krisis Krimea kebijakan luar negeri Amerika Serikat cenderung lebih “halus” daripada kebijakan sebelumnya.³

Dalam Penelitian tersebut Nils Knudsen Vardam menjelaskan bahwa faktor yang sangat mempengaruhi adanya perubahan dari Kebijakan Amerika Serikat adalah dari faktor *leader*, dimana saat krisis Georgia dan Russia terjadi di tahun 2008, saat itu Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden Bush. Sedangkan saat Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan terhadap konflik yang terjadi antara Russia dan Krimea tahun 2014, pada saat itu Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden Obama yang memiliki pandangan berbeda terhadap hubungan antara Russia dan Amerika, karena Amerika Serikat pada masa pemerintahan Obama sangat mementingkan peran Russia dalam kebijakan keamanannya. Berbeda dengan masa pemerintahan Bush, dimana Amerika Serikat sangat berhati – hati dalam menjalin berhubungan dengan Russia, oleh karena itu kedua kebijakan tersebut memiliki tujuan dan intensitas yang berbeda.⁴

Alasan penulis menggunakan penelitian Nils Knudsen Vardam yang berjudul *U.S. foreign policy decision-making during the wars in Georgia and Ukraine* adalah karena penelitian tersebut sama –sama menguji tentang analisis

³ Verdam, Nils Knudsen. (2016). “*U.S. foreign policy decision-making during the wars in Georgia and Ukraine*”. Swedish Defence University. Hamalam 16-30

⁴ *Ibid.*

kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan menggunakan konsep *Foreign Policy Analysis* milik Charles W. Kegley. Namun penelitian karya penulis Nils Knudsen Vardam lebih fokus membahas analisis perubahan kebijakan Amerika Serikat dalam krisis di Russia dan Georgia pada tahun 2008 dan 2014, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan lebih fokus dalam menganalisa kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat yang bernama *Washington Declaration on defense* dengan menggunakan konsep *Foreign Policy Analysis* milik Charles W. Kegley.



2.2 Kajian Konseptual

2.2.1 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri (*foreign Policy*) adalah keputusan atau kebijakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara yang berhubungan dengan faktor domestik atau keadaan dalam negeri dan faktor internasional yang mengacu pada kondisi sistem internasional.⁵ Kegley dan Wittkopf menekankan kebijakan luar negeri sebagai *decisions governing authorities make to realize international goals*.⁶ Sehingga dalam perumusan kebijakan luar negeri para elite atau pembuat kebijakan harus memperhatikan nilai – nilai penting dari tujuan suatu negara serta alat untuk mencapai tujuan tersebut.

Kegley membagi determinan faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri kedalam tiga determinan faktor dan menghasilkan *feedback* yang nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan. Ketiga determinan tersebut adalah *global condition*, *internal / domestic characteristics*, dan *actor leadership* atau pembuat kebijakan.⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan luar negeri adalah sebuah formula atau rencana yang disusun berdasarkan tujuan bangsa lalu digunakan oleh pemerintah untuk berinteraksi dengan aktor *state* dan *non – state* agar mencapai tujuan atau rencana tersebut.

⁵ Perwita, Anak Agung Banyu & Yayan Mochamad Yani. (2006). “*Pengantar Hubungan Internasional*”. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Halaman 48

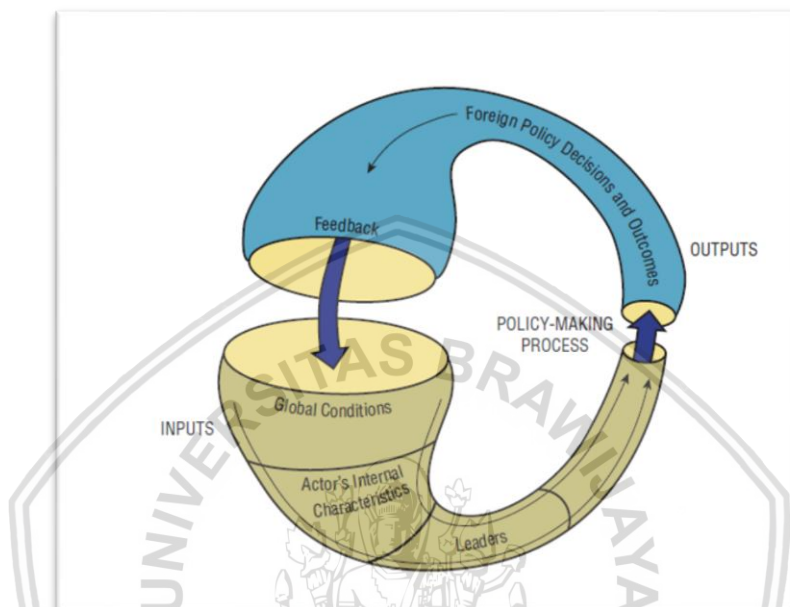
⁶ Kegley, William Charles & Shannon L. Blanton. (2010). “*World Politics Trend ant Transformation*”. Canada: Cengage Brain. Halaman 190

⁷ *Ibid.* Halaman 190-194

2.2.2 Konsep *Foreign Policy Analysis*

GAMBAR 1

“Funnel Vision” atau Faktor yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan



Sumber: Kegley, William Charles & Shannon L. Blanton. (2010). *“World Politics Trend ant Transformation”*. Canada: Cengage Brain. Halaman 192

Charles Kegley berpendapat bahwa dalam proses pembuatan kebijakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut terbentuk yaitu kondisi global, kondisi internal, dan karakteristik dari individu atau pembuat kebijakan, ketiga faktor ini dikategorikan sebagai *input* dari proses pembuatan kebijakan, dan ada satu *feedback* yang muncul sebagai *output* dari pembuatan kebijakan tersebut. Dalam menyusun sebuah kebijakan luar negeri, para pemimpin harus merumuskan kebijakan secara bersamaan di arena diplomatik internasional dan domestik dan harus membuat pilihan tersebut sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh "permainan" tersebut, atau dengan *“two level game”*. Berikut adalah penjelasan dari ketiga faktor tersebut:

Global Condition

Global Condition adalah pengaruh eksternal dari suatu kebijakan luar negeri. Dalam variabel ini semua bentuk aktivitas yang terjadi diluar batas teritori negara dapat mempengaruhi pilihan-pilihan yang dimiliki oleh para pemerintahan suatu negara. Suatu kebijakan luar negeri dibuat berdasarkan respons negara tersebut atas kondisi atau keadaan politik dunia yang sedang terjadi, kondisi tersebut Kegley sebut dengan *global trend*. *Global Trend* ini bisa berupa isu *global warming*, *terrorism*, krisis pangan ,dan nuklir yang terjadi di beberapa belahan dunia dan menjadi perhatian internasional sehingga mengubah tatanan sistem global yang dapat mempengaruhi suatu negara untuk membuat suatu kebijakan luar negeri.⁸

Selain itu polarisasi kekuasaan dalam sistem internasional juga berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. Polarisasi yang dimaksudkan adalah bagaimana distribusi kekuasaan dalam sistem internasional apakah bipolar ,uni polar ataukah multiporal dimana terdapat banyak kekuasaan yang muncul dan tidak didominasi oleh satu atau dua kekuasaan saja. Polarisasi dalam sistem internasional memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi suatu negara dalam mengambil keputusan dan hubungan antar negara, ketika sistem internasional hanya terkonsentrasi pada satu kekuasaan saja (uni polar) maka, negara tersebut akan lebih bebas untuk menggunakan kekuatan militer dan campur tangan dalam urusan negara lain, sehingga dalam kondisi ini negara-negara kecil yang

⁸ *Ibid.* Halaman 191-192

tergabung dalam aliansi dengan blok militer yang ketat akan cenderung untuk menyesuaikan diri dengan perintah pemimpin aliansi tersebut.⁹

Kegley juga menjelaskan bahwa posisi geo strategi suatu negara dapat mempengaruhi bagaimana suatu keputusan dibuat. Geo strategi merupakan konsep yang menjelaskan tentang strategi atau upaya sebuah negara dalam mengintegrasikan berbagai alternatif kondisi yang ditimbulkan oleh posisi geografis suatu negara terhadap posisi di negara lain dalam bingkai kebijakan luar negeri.¹⁰ Sehingga Kegley berpendapat bahwa pengaruh posisi geo strategi dalam terciptanya sebuah kebijakan luar negeri dapat diukur melalui beberapa aspek yaitu: letak geografis suatu negara, sumber daya alam, dan kondisi fisik lingkungan dari suatu negara yang diproyeksikan terhadap negara lain. Kegley menyebutkan bahwa negara yang memiliki posisi geo strategi yang menguntungkan dapat menjalankan kebijakan luar negerinya tanpa adanya campur tangan dari pihak eksternal, menurut Kegley posisi geo strategi yang menguntungkan adalah negara yang memiliki letak geografis yang terisolasi dan lautan yang luas akan memiliki keuntungan dalam menjalankan kebijakan luar negerinya sebagai contoh kesuksesan Amerika dalam menjalankan kebijakan luar negerinya karena letak Amerika yang terpisah dari benua Eropa dan Asia menjadikan Amerika dengan bebas untuk memonopoli perdagangan jalur laut, tanpa takut adanya intervensi dari negara tetangga.¹¹

⁹ *Ibid.* Halaman 216

¹⁰ Cohen, Saul Bernard. (2003). *Geopolitics of The World System*". London: Bowman and Uttz Publisher. Halaman 12-13

¹¹ Kegley, William Charles. *Op.Cit.* Halaman 217-218

Internal characteristics

Kondisi domestik adalah faktor yang juga mempengaruhi sebuah kebijakan, karena tujuan dari kebijakan luar negeri adalah untuk mendapatkan *national interest*. Hal yang penting dalam kondisi domestik adalah kapabilitas militer dalam suatu negara, banyak negara yang memiliki prioritas kebijakan luar negeri di bidang militer sebagai persiapan perang namun walaupun mereka memiliki tujuan yang sama, mereka memiliki kemampuan yang bervariasi dalam bidang militer.¹²

Kegley menganggap kebijakan luar negeri juga didukung dengan bagaimana persiapan suatu negara dalam mengkalkulasikan kapabilitas militernya dalam menghadapi perang, setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi suatu permasalahan tergantung bagaimana perhitungan kapabilitas, militer yang mereka miliki yang diukur melalui kepemilikan senjata, personil, dan anggaran uang negara untuk keperluan militer. Suatu negara akan mementingkan keamanan diri mereka sendiri, sehingga dalam rangka untuk menjamin keamanan, sebuah negara dituntut untuk memaksimalkan kapabilitas militer secara relatif kepada negara lain. Kegley menyebutkan jika negara akan memperluas kepentingan politiknya melalui kebijakan luar negeri ketika para pembuat kebijakan melihat ada sebuah peningkatan kekuatan relatif dari negara lain¹³

Kondisi internal lain yang mempengaruhi sebuah kebijakan adalah kondisi ekonomi sebuah negara yang berpengaruh dalam terbentuknya suatu kebijakan

¹² *Ibid.* Halaman 218

¹³ *Ibid.* Halaman 219

luar negeri. Kondisi ekonomi dapat dilihat dari level perekonomian sebuah negara dan diukur dari aspek perkembangan industri, keterlibatan yang luas dalam perdagangan internasional, dan kemakmuran dalam suatu negara yang mempengaruhi kebijakan luar negerinya. Dalam bukunya yang berjudul *The Global Future: A brief Introduction to World Politic*, Kegley mengatakan bahwa negara yang kaya, makmur dan memiliki tingkat industri yang tinggi cenderung akan mengembangkan kekuatannya di luar batas negaranya, dan biasanya negara kaya yang memiliki keterlibatan dalam perdagangan internasional juga cenderung memiliki kapabilitas militer yang sangat kuat. Namun negara dengan ekonomi yang maju sering merasa puas sehingga mereka tidak memiliki kebijakan luar negeri yang menantang dan membuat mereka tidak siap dalam menerima perubahan global.

Sedangkan negara miskin dalam merespons kondisi global sangat bergantung pada negara lain yang lebih maju yang menjadikan mereka berada di hierarki terbawah dalam ekonomi global. Beberapa negara yang memiliki perekonomian lemah menanggapi situasi mereka dengan mematuhi keinginan negara kaya yang mereka andalkan, namun banyak juga dari negara miskin yang memberontak, menentang, dan melawan negara kaya dan organisasi internasional dalam mengendalikan perilaku mereka.¹⁴

Selain faktor ekonomi, bentuk pemerintahan suatu negara memiliki peran penting bagi proses pembuatan kebijakan karena dalam sebuah negara terdapat pemerintahan yang merumuskan dan menjalankan kebijakan dan juga jenis

¹⁴ *Ibid.* Halaman 220

pemerintahan akan mempengaruhi jalannya suatu kebijakan. Kegley mendefinisikan bentuk pemerintahan menjadi dua macam yaitu: pemerintahan autokrasi atau sistem pemerintahan dengan pemimpin yang mengatur semua arah kebijakan dan kekuasaan yang tidak terbatas. Dimana dalam pemerintahan autokrasi semua keputusan yang diambil untuk membuat suatu kebijakan luar negeri hanya ditentukan oleh para elite dan opini publik tidak terlalu dianggap penting. Yang kedua adalah pemerintahan demokrasi dimana pemimpin tetap memegang kendali jalannya pemerintahan, namun opini publik, partai politik, dan media massa juga memiliki peran yang signifikan dalam proses pembuatan kebijakan.¹⁵

Actor leadership

Individu yang dimaksud oleh Kegley adalah para pembuat keputusan dalam suatu negara yaitu para eksekutif atau pemimpin negara yang memiliki peran penting dalam menemukan arah kebijakan suatu negara. Kegley memiliki istilah *Political efficacy* yang berarti bahwa individu atau decision maker merupakan aktor penting atau *key actor* dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini dikarenakan suatu kebijakan yang dihasilkan oleh suatu negara sangat bergantung dan memiliki pada nilai atau keyakinan yang dianut oleh *key actor* tersebut. Latar belakang pendidikan kepercayaan bahwa ia dapat membuat

¹⁵ *Ibid.* Halaman 220- 222

keputusan yang rasional mempengaruhi pola pikir dan perilaku *key actor* atau pemimpin.¹⁶

Ketiga faktor diatas adalah faktor utama yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara, fungsi ketiga faktor tersebut adalah sebagai *input* yang untuk menghasilkan suatu kebijakan. Setelah kebijakan dibentuk, maka akan ada *feedback* atau respons atas kebijakan tersebut yang berfungsi sebagai output dan berfungsi sebagai bahan pengambilan kebijakan yang lain. Faktor *feedback* dapat datang dari kebijakan sebelum atau setelah suatu kebijakan tersebut di keluarkan. Hasil dari suatu kebijakan sangat tergantung berdasarkan keadaan sebelumnya atau berdasarkan faktor – faktor input. Seperti yang digambarkan dalam ilustrasi di atas. (**lihat Gambar 1**)

2.2.3 Operasionlisasi Konsep

Dalam pengoperasionalisasian konsep ini, penulis berpijak pada tujuan penulis yaitu untuk menganalisa alasan Amerika mengeluarkan kebijakan Pertahanan Amerika Serikat Dengan Selandia Baru melalui *Washington Declaration on defense* Pada Tahun 2012. Maka konsep yang dioperasionalkan menurut penulis adalah konsep *Foreign Policy Analysis* oleh Charles W. Kegley dimana dijelaskan bahwa dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri terdapat tiga faktor utama yang berperan sebagai input dan menghasilkan sebuah output berupa *feedback* yang berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan untuk kebijakan lain.

¹⁶ *Ibid.* Halaman 208 -2013

Penulis melakukan operasionalisasi yang didapat dari konsep *Foreign Policy Analysis*, dimana dari konsep tersebut terdapat tiga variabel utama yang penulis gunakan untuk pijakan penelitian, yaitu: *Global condition*, *Internal Condition*, *Actor Leadership*, dan *feedback*.

Berikut merupakan operasionalisasi konsep yang penulis rumuskan dalam konsep *Foreign Policy Analysis* :

Tabel 1
Konsep *Foreign Policy Analysis* Charles William Kegley

Konsep	Variabel
<i>Foreign Policy Analysis</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Feed Back</i> 2. <i>Global Condition</i> 3. <i>Internal Characteristics</i> 4. <i>Actor Leadership</i>

Sumber: Kegley, William Charles & Shannon L. Blanton. (2010). *World Politics Trend ant Transformation*. Canada: Cengage Brain. Halaman 192

Lalu penulis merumuskan operasionalisasi yang didapatkan dari konsep yang digunakan sebagai pijakan utama ke dalam indikator penelitian serta konsep yang diambil pada penelitian Kebijakan Pertahanan Amerika Serikat Dengan Selandia Baru melalui *Washington Declaration on defense* Pada Tahun 2012.

Tabel 2

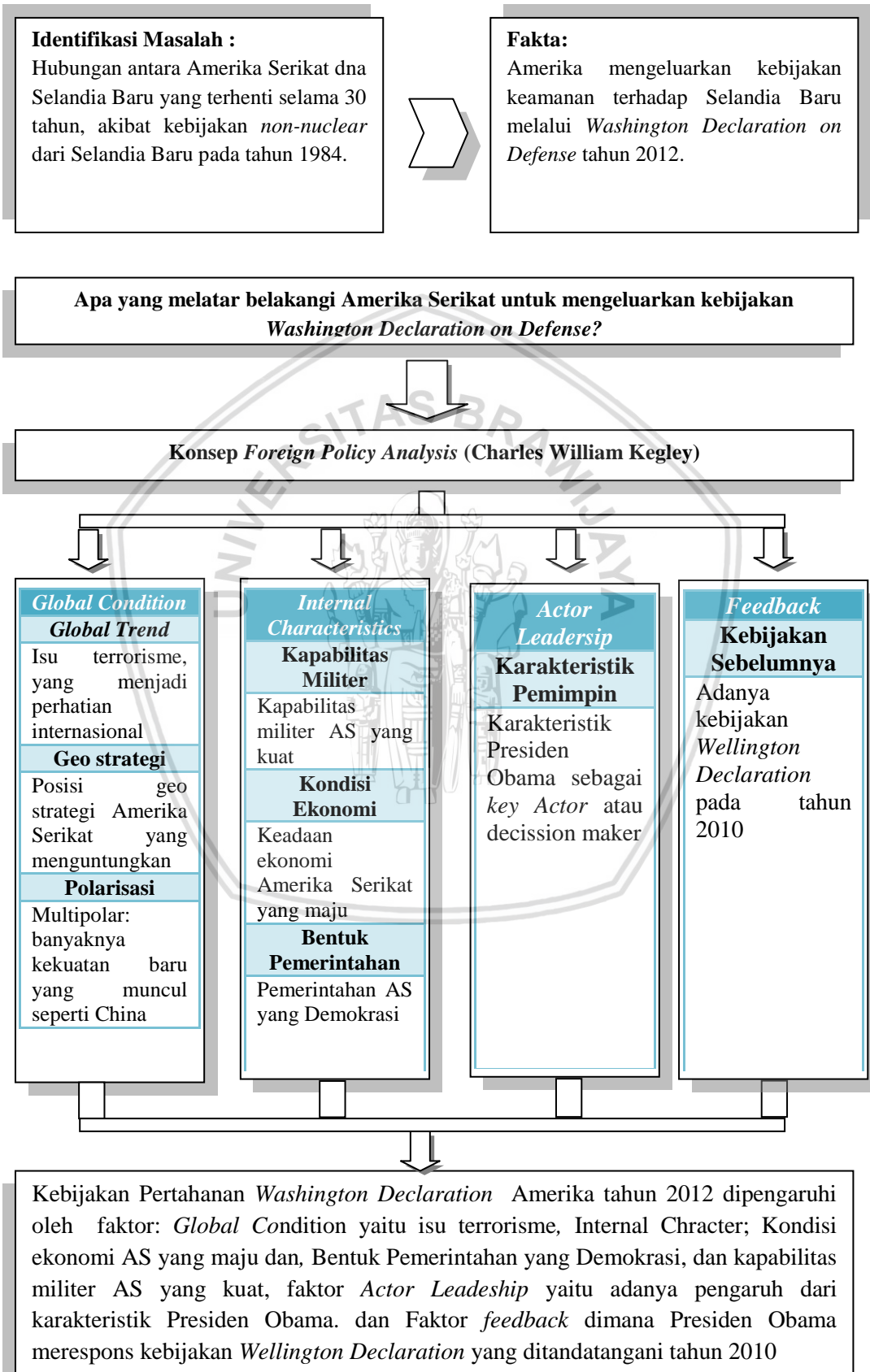
Kebijakan Pertahanan Amerika Serikat Dengan
Selandia Baru dalam Indikator *Foreign Policy Analysis*

Variabel	Indikator	Operasionalisasi
<i>Feed Back</i>	Adanya pengaruh dari kebijakan luar negeri yang dibentuk sebelum atau setelah kebijakan tersebut di keluarkan	Adanya Kebijakan <i>Wellington Declaration</i> pada tahun 2010.
<i>Global Condition</i>	Adanya <i>Global Trend</i> yang menjadi perhatian banyak negara.	Isu Global yang berkembang ketika kebijakan itu dikeluarkan yaitu isu bencana alam dan terorisme.
	Polarisasi dalam sistem internasional mempengaruhi kebijakan luar negeri dan pola hubungan antar negara	Munculnya kekuatan baru yang mendominasi kawasan Pasifik, yaitu China.
	Posisi Geo strategi yang strategis dan menguntungkan sehingga	Adanya pengaruh dari posisi geo strategi Selandia Baru yang membuat pemerintahan

	mempengaruhi kebijakan luar negerinya.	Obama mengeluarkan kebijakan <i>Washington Declaration on Defense</i> pada tahun 2012.
Internal Characteristics	Kepemilikan senjata dan alutsista militer yang digunakan sebagai kalkulasi kapabilitas militer suatu negara.	Kepemilikan senjata dan alutsista Amerika Serikat yang canggih sehingga mempengaruhi kalkulasi kapabilitas militer Amerika Serikat dalam membuat kebijakan luar negeri.
	Kondisi ekonomi yang diukur dari aspek perkembangan industri, keterlibatan yang luas dalam perdagangan internasional, dan kemakmuran dalam suatu negara yang mempengaruhi kebijakan luar negerinya.	Majunya perekonomian di Amerika Serikat sehingga memungkinkan adanya pengaruh dari perkembangan industri, tingkat kemakmuran masyarakat AS, dan GDP AS dalam mengeluarkan kebijakan <i>Washington Declaration on Defense</i> .
	Bentuk Pemerintahan suatu negara yang demokrasi atau autokrasi.	Bentuk pemerintahan AS yang sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi

		sehingga memungkinkan adanya peran media dan opini publik dalam mengeluarkan kebijakan <i>Washington Declaration on Defense</i> .
<i>Actor Leadership</i>	Adanya pengaruh dari karakteristik Pemimpin.	Karakteristik Presiden Obama yang terlihat dari arah kebijakan dan politik AS ke kawasan Asia Pasifik setelah Obama terpilih menjadi Presiden AS.

2.2.4 Alur Pemikiran



2.3 Argumen Utama

Berdasarkan dengan kerangka pemikiran yang telah penulis jelaskan, selanjutnya penulis mengajukan argumen utama sebagai berikut:

Alasan yang melatarbelakangi Amerika Serikat dalam membuat kebijakan *Washington Declaration on Defense* terhadap Selandia Baru pada tahun 2012 dipengaruhi dari adanya faktor yang telah dijelaskan oleh Charles William Kegley dalam konsep *Foreign Policy Analysis* yaitu: adanya *feedback* dari kebijakan sebelumnya. Dalam *global condition*, lalu adanya pengaruh *Global Condition*, adanya faktor domestik dan yang terakhir adanya pengaruh *Actor Leadership* yang mendorong Amerika Serikat untuk mengeluarkan kebijakan *Washington Declaration on Defense*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan mode penelitian deskriptif. Dimana penulis akan menjelaskan dan menganalisis alasan Amerika Serikat menjalin kerja sama dengan Selandia Baru dimana hubungan tersebut terjalin kembali setelah 30 tahun bungkam. Kerja sama tersebut dilaksanakan dibawah kebijakan *Washington Declaration on Defense* yang di inisiasikan oleh Presiden Obama.

3.2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian ini dimulai pada sejak hubungan Amerika Serikat dan Selandia Baru kian membaik yakni pada tahun 2000 hingga tahun 2012 dimana Amerika Serikat mengeluarkan Kebijakan *Washington Declaration*. Penelitian ini mengarah kepada deskripsi alasan Pemerintah Amerika Serikat dalam mengeluarkan kebijakan *Washington Declaration on Defense* dengan Selandia Baru.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*Library Research*) dengan cara mengumpulkan sejumlah data sekunder seperti artikel, jurnal, laporan, buku, surat kabar, dan media internet yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

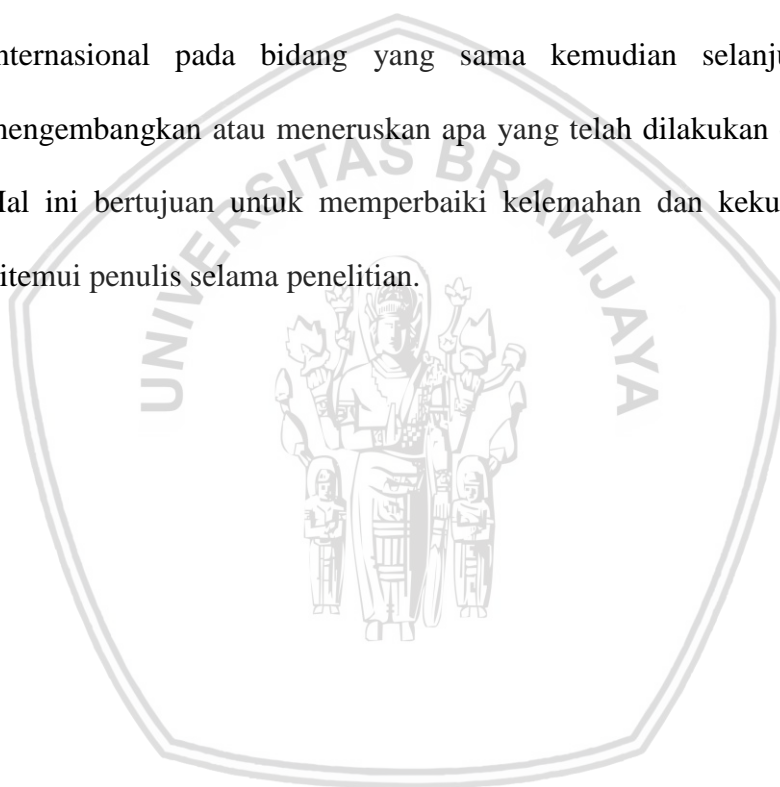
3.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

1. **BAB I** adalah Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang dan Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan, serta Manfaat Penulisan.
2. **BAB II** adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang studi terdahulu serta tujuan terhadap penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menganalisa alasan Amerika Serikat dalam mengeluarkan kebijakan Pertahanan *Washington Declaration on Defense* yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Selandia Baru pada tahun 2012. Tinjauan studi dari studi terdahulu kemudian akan menjadi bahan pembandingan dan posisi penelitian yang dilakukan oleh penulis konsep, selanjutnya dihasilkan sebuah hipotesis penulisan yang kemudian dari semua itu terdapat konseptualisasi untuk mempermudah pemahaman yang ingin disampaikan oleh penulis terkait penelitian yang dilakukan.
3. **BAB III** adalah penjelasan mengenai metode penulisan yang dilakukan penulis untuk menentukan jenis penelitian, ruang lingkup serta teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini.
4. **BAB IV** adalah Pembahasan serta analisis yang akan memberikan analisis mengenai alasan yang melatarbelakangi Pemerintah Amerika Serikat pada masa Pemerintahan presiden Obama dalam menyusun kebijakan *Washington Declaration on Defense* dengan Selandia Baru, dan Gambaran umum mengenai krisis serta penjabaran lebih lanjut terkait latar belakang

masalah serta uraian gambaran umum tentang kebijakan *Washington Declaration on Defense*.

5. **BAB V** adalah Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi mengenai ringkasan penulisan, kesimpulan penelitian, serta pengujian mengenai tepat atau tidaknya hipotesis yang dikeluarkan oleh penulis. Selanjutnya, bab ini juga memuat saran- saran bagi para peneliti Hubungan Internasional pada bidang yang sama kemudian selanjutnya untuk mengembangkan atau meneruskan apa yang telah dilakukan oleh penulis. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ditemui penulis selama penelitian.



BAB IV

GAMBARAN UMUM

HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT – SELANDIA BARU

Hubungan antara Amerika Serikat dan Selandia Baru bermula pada akhir abad ke 18, dimana banyak dari pelaut Amerika Serikat singgah di teluk Selandia Baru untuk berburu ikan paus. Karena banyaknya pelaut Amerika Serikat yang singgah di Selandia Baru, akhirnya pada tahun 1838 Presiden Amerika yang ke delapan, Martin Van Buren mendirikan kantor konsulat di Selandia Baru. Amerika Serikat merupakan negara pertama yang mendirikan kantor konsulat di Selandia Baru pada saat itu.¹ Setelah terdapat kantor konsulat, hubungan antara kedua negara semakin erat, karena banyaknya aktor-aktor yang berpengaruh terhadap masyarakat Selandia Baru dan pasca Perang Dunia pertama, banyak perusahaan Amerika Serikat yang meluaskan pasarnya di Selandia Baru. Perusahaan *General Motor* membuka cabang di wilayah Petone, Selandia Baru pada tahun 1926.²

Selama periode Perang Dunia kedua, Amerika Serikat membantu melindungi Selandia Baru dari Invasi Jepang dengan mengirimkan sekitar 100.000 pasukan militernya ke Selandia Baru. Semenjak saat itulah Amerika Serikat menjadi penyedia utama keamanan militer di kawasan Asia Pasifik.³ Dalam rangka untuk membantu melindungi Selandia Baru dari pengaruh Jepang,

¹ Ayson, Robert and Jock Phillips.(2012).*Loc.cit*

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Amerika Serikat berinisiatif untuk membentuk sebuah aliansi bersama Selandia Baru dan Australia yang bernama ANZUS, dengan adanya aliansi ini hubungan antar kedua negara semakin kuat, namun pasca pergantian Perdana Menteri Selandia Baru, hubungan kedua negara mengalami gejolak dan permasalahan. Hubungan kerja sama militer kedua negara pun sempat terputus selama lebih dari 30 tahun. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan dinamika hubungan kerja sama militer antara Amerika dan Selandia Baru dari awal terbentuknya aliansi ANZUS.

4.1 Kerja sama Militer dan Pertahanan Amerika Serikat – Selandia Baru

1. Australia, New Zealand, United State Security Treaty (ANZUS)

Pasca Perang Dunia Kedua, sistem politik internasional berubah menjadi bipolar, dimana terdapat dua kekuasaan yang mendominasi yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara bersaing dalam menyebarkan nilai ideologi mereka anuti terhadap negara lain dan berlomba-lomba dalam menjalin aliansi. Kondisi tersebut melahirkan pecahnya Perang Dingin yang terjadi pada tahun 1945 dimana kedua negara tidak melakukan konfrontasi secara langsung, maka dari itu Perang Dingin sering disebut perang dengan konflik lebih bersifat politis daripada militer. Kedua belah pihak saling berdebat satu sama lain di PBB, mencari hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara lain, serta berlomba lomba dalam mengembangkan energi nuklir.⁴

⁴ Gaddis, John Lewis. (1972). "The United States and the Origins of the Cold War". New York: Columbia University Press. Halaman 33

Memasuki tahun 1950, terdapat faktor-faktor tertentu yang menjadikan Perang Dingin termiliterisasi karena pada saat itu Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan *Containment Policy* yang bertujuan untuk membendung persebaran kekuasaan Uni Soviet. Kebijakan tersebut terbentuk karena telegram yang dikirim oleh George F. Truman yang dikenal dengan *The Long Telegram*. *Containment Policy* yang dikeluarkan Amerika Serikat memilih bersikap “*Balancing Power*” dengan meningkatkan kapabilitas militernya.⁵ Semenjak saat itu terjadilah *proxy war* di Korea dan Vietnam dimana dalang dibalik perang tersebut adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Bangkitnya paham Komunis di Tiongkok membuat Amerika Serikat was-was, oleh sebab itu dalam rangka mencegah tersebarnya komunisme di daerah Asia –Pasifik.⁶ Presiden Amerika Serikat, Hanry Truman mengeluarkan kebijakan untuk membentuk aliansi militer bersama Australia dan Selandia Baru pada tahun 1951 yang bernama ANZUS. Aliansi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas wilayah pasifik, khususnya dari ancaman komunisme yang sudah menguasai wilayah Asia Selatan.⁷ Hal tersebut sesuai dengan pasal IV ANZUS yang menyatakan bahwa jika terdapat sebuah serangan bersenjata yang mengancam keamanan dan perdamaian kawasan Pasifik, maka serangan tersebut dianggap sebagai bahaya bersama dan setiap anggota aliansi akan bertindak untuk menghindari bahaya tersebut sesuai dengan konstitusi dari masing-masing negara.

⁵ Soddu, Marco. "Truman Administration's Containment Policy: In Light of the French Return to Indochina." *Foreign Journal*. Halaman 2

⁶ *Ibid.*

⁷ Chinkin, Christine M. (1990). "Suspension of Treaty Relationship: The ANZUS Alliances" *Pacific Basin Law Journal*. Halaman 118

Oleh sebab itu setiap ancaman yang berpotensi mengganggu integritas teritorial, kemerdekaan politik atau keamanan salah satu pihak akan segera dikonsultasikan bersama, sesuai dengan apa yang tertulis dalam pasal III perjanjian ANZUS.⁸

Bagi Amerika Serikat ANZUS merupakan aliansi yang sangat krusial dan intim, hal ini dapat dilihat ketika Australia dan Selandia Baru mengirimkan bantuan militer untuk mendukung Amerika Serikat dalam perang Korea di Vietnam. AS juga menganggap ANZUS sebagai cara untuk mengawasi perkembangan gerakan komunisme di wilayah pasifik, karena pada saat itu paham komunisme telah menyebar di kawasan Asia Tenggara dan Timur terutama di Vietnam dan China. Sedangkan bagi Australia dan Selandia Baru adanya aliansi ANZUS dapat mendatangkan keuntungan bagi mereka, terutama di bidang keamanan. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat merupakan negara kuat dan tidak ada negara yang berani mengusik AS, terlebih dengan menjadi aliansi Amerika Serikat maka keamanan Australia dan Selandia Baru akan dijamin oleh Amerika Serikat.⁹

Memasuki tahun 1960-an lahir gerakan anti nuklir yang bernama *Campaign for Nuclear Disarmament* (CND) yang menentang dan ingin menghilangkan senjata nuklir yang berada di Selandia Baru.¹⁰ Gerakan tersebut menjadi sangat berpengaruh di Selandia Baru setelah Perancis melancarkan misi uji coba nuklir di kawasan Pasifik Selatan, tepatnya di Moruroa dan Fangataufa

⁸ The ANZUS Treaty. Article 3 & 4

⁹ Greener, Peter.(2009). "*Timing is Everything: The politics and Processes of New Zealand Defence Acquisition decision making*" Canberra: Australia National University Press. Halaman 5

¹⁰ Green Peace.(2006). "*History Of The Anti Nuclear Movement In New Zealand*" **Diakses pada tanggal** 25 April 2018 **dari** <http://www.greenpeace.org/new-zealand/en/campaigns/nuclear/nuclear-free-nz/anti-nuke-history-NZ/>

pada tahun 1960 hingga 1974 yang membuat masyarakat Selandia Baru marah dan meminta agar Pemerintah Selandia Baru untuk bertindak lebih lanjut.¹¹ Menanggapi hal tersebut, akhirnya pada tahun 1973 Pemerintah Selandia Baru mengirimkan kapal perang ke wilayah kepulauan Muruora dan melaporkan Perancis ke ICJ.¹²

Atas kejadian tersebut, Selandia Baru menjadi negara yang sangat menentang nuklir, sampai akhirnya ketika tahun 1984 David Lange terpilih menjadi Perdana Menteri Selandia Baru beliau meresmikan kebijakan anti nuklir yang bernama *New Zealand Nuclear Free Zone, Disarmament, and Control Act* pada tahun 1987.¹³ Hal ini juga semakin dipertegas dengan pernyataan David Lange yang mengatakan bahwa Selandia Baru tidak akan mentolerir tentang masalah nuklir.

“New Zealand is a nuclear -free country. We reject any strategy for our defence which relies on nuclear weapons. New Zealand will not in anyway take part in the nuclear arms race or join in any confrontation between nuclear forces. New Zealand will take no action which suggests that its security depends on nuclear weapons”

(David Lange, 1986)¹⁴

¹¹ Dewes, Kate.(1999).” Aotearoa/New Zealand At The World Court”. Christchurch: Disarmament and Security Centre. Halaman 8

¹² *Ibid.* Halaman 9

¹³ *Ibid.* Halaman 14-15

¹⁴ *Ibid.* Halaman 17

Akibat adanya kebijakan *Zealand Nuclear Free Zone, Disarmament, and Control Act*, membuat hubungan aliansi antara Amerika Serikat dan Selandia Baru mengalami kemunduran, pasalnya dengan adanya kebijakan tersebut Amerika Serikat harus menarik kembali kapal-kapal militernya yang berada di kawasan Pasifik Selatan dan sekitar Selandia Baru padahal Amerika Serikat memiliki pangkalan militer yang berada di Australia.¹⁵ Bukan hanya itu, Selandia Baru juga menolak untuk memberikan izin kepada kapal USS Buchanan milik Amerika untuk berlabuh di kawasan Selandia Baru karena dinilai bahwa kapal tersebut berpotensi nuklir. Penolakan tersebut dikeluarkan oleh Geoffrey Palmer yang pada saat itu menjabat sebagai Deputy Perdana Menteri Selandia Baru, menurut Geoffrey walaupun pada saat itu pihak Amerika Serikat memberi pernyataan bahwa kapal USS Buchanan tidak membawa senjata nuklir, akan tetapi Geoffrey menganggap bahwa kapal-kapal tersebut dibuat untuk membawa senjata nuklir.¹⁶

Akibat penolakan tersebut akhirnya pihak Amerika Serikat memutuskan untuk menghentikan segala kerja sama militernya bersama Selandia Baru, Amerika Serikat juga membatalkan rencana latihan militer *Sea Eagle*.¹⁷ Menurut Amerika Serikat, kebijakan anti nuklir Selandia Baru tersebut akan sangat membahayakan aliansi negara-negara barat. Akhirnya pada tanggal 27 Juni 1986 Amerika Serikat membalas kebijakan Selandia Baru dengan menanggukkan kewajiban keamanan AS terhadap Selandia Baru, Amerika Serikat melalui

¹⁵ Catalinac, Amy L. *Op.cit.* Halaman 318

¹⁶ Greener, Peter. (2009). *Op.cit.* Halaman 10

¹⁷ Chinkin, Christine M. (1990). *Op.Cit.* Halamn 128

Presiden Reagan juga memutuskan hubungan aliansi AS dengan Selandia Baru dan hanya menganggap Selandia baru hanya sebagai “teman”. Dengan demikian keanggotaan Selandia Baru dalam aliansi ANZUS tidak lagi penting, sehingga keberadaan ANZUS tidak se aktif seperti sebelumnya, namun Amerika Serikat tetap menjalin hubungan aliansi nya dengan Australia, tapi diluar kerangka ANZUS.¹⁸

Setelah Amerika Serikat memutuskan hubungan aliansi nya dengan Selandia Baru, hubungan kedua negara tidak lagi harmonis. Kedua negara bahkan tidak pernah lagi melakukan kerja sama semenjak tahun 1896. Namun hubungan antara Amerika Serikat dan Selandia Baru sempat kembali membaik pada tahun 2000-an, walaupun tidak dilaksanakan dalam kerangka hubungan kerja sama yang formal hingga akhirnya kedua negara kembali menjalin hubungan kerja sama keamanan pada tahun 2010 untuk pertama kalinya setelah 30 tahun tidak bekerja sama.

2. Operation Enduring Freedom

Pada tanggal 11 September 2001 Amerika Serikat mendapatkan serangan terorisme berupa ditabrak nya gedung WTC yang menyebabkan Amerika Serikat mendapatkan kerugian yang sangat besar dan memakan ribuan korban. Keamanan nasional Amerika Serikat sangat terancam akibat kejadian 9/11, maka dari itu Presiden Josh Bush mengeluarkan kebijakan *War on Terror* untuk mencegah kejadian serupa terjadi kembali. Kebijakan tersebut direalisasikan oleh Bush dengan adanya operasi militer yang bernama *Operation Enduring Freedom* yang

¹⁸ Catalinac, Amy L.*Op.cit.* Halaman 318-319

dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2001, operasi militer tersebut bertujuan untuk memberantas kelompok Al-Qaeda dan mencari otak dari kelompok tersebut yaitu Osama bin Laden yang merupakan dalang dari kejadian 9/11.

Menanggapi kebijakan AS tersebut, Selandia Baru pada tahun 2002 memerintahkan pasukan militernya untuk terjun dalam *Operation Enduring Freedom*, selain pasukan militer Selandia Baru juga mengerahkan kapal patroli HMNZS ke Taha untuk berpatroli di wilayah Laut Arab dan Teluk Oman bersama *Coalition Task Grup* yang dipimpin oleh Kanada.¹⁹ Tidak hanya itu, pada tahun 2003 Selandia Baru mengirimkan kapal patroli Ta Ma yang bertugas untuk mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi tentang anggota Taliban dan Al-Qaeda. Perdana Menteri Selandia Baru, menyatakan bahwa Selandia Baru akan terus berusaha memberantas terorisme, hal terbukti dengan dukungan Selandia Baru dalam *Operation Enduring Freedom* berlanjut hingga tahun 2009, jika di kalkulasikan terdapat lebih dari 500 pasukan militer.²⁰

3. *Wellington Declaration*

Pada tahun 2010, hubungan Selandia Baru dan Amerika Serikat memasuki babak baru yang harmonis, hal ini ditandai dengan adanya pertemuan antara Menteri Luar Negeri Kedua Negara yaitu Hillary Clinton dan Murray McCully pada tanggal 4 November 2010. Tujuan diadakannya pertemuan ini adalah untuk membahas kerangka hubungan baru antara kedua negara, walaupun dalam

¹⁹ Clark, Helen.(2002). "NZ Navy and Air Force Join International Campaign Against Terrorism.. Diakses pada tanggal 18 April 2018 dari: <https://www.beehive.govt.nz/release/nz-navy-and-air-force-join-international-campaign-against-terrorism>.

²⁰ *Ibid*.

pertemuan tersebut tidak menghasilkan keputusan yang formal , namun pertemuan ini merupakan langkah awal bagi kedua negara untuk memperbaiki dan memulai hubungan yang sempat terputus selama lebih dari 30 tahun.²¹

Hasil diskusi dari pertemuan tersebut kemudian di legalkan kedalam bentuk dokumen yang berjudul *Wellington Declaration*. Isi dari *Wellington Declaration* adalah untuk menegaskan kembali hubungan kerja sama antara kedua negara dan kerangka kerja sama politik di masa depan melalui nilai demokratis. Kerja sama tersebut akan dilandasi oleh dua fundamental yaitu: fokus baru pada kerja sama praktis di kawasan Pasifik dan dialog mengenai subjek politik dan militer yang melibatkan pertemuan antara kedua Menteri Luar Negeri. Dalam kebijakan *Wellington Declaration* juga dijelaskan bahwa AS dan Selandia Baru memutuskan untuk meningkatkan kerja sama kedua negara dalam menghadapi tantangan regional dan global yang lebih luas, seperti perubahan iklim, proliferasi nuklir, dan terorisme.

1. *Washington Declaration*

Dua tahun setelah kebijakan *Wellington Declaration* dibentuk, kedua negara akhirnya memutuskan untuk melakukan pertemuan kembali pada tahun 2012 di Washington DC, Amerika Serikat. Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Pertahanan dari masing-masing negara, Amerika Serikat diwakili oleh Leon Panneta dan Jonathan Coleman sebagai perwakilan dari Selandia Baru.

²¹ Vaughn, Bruce Robert.(2012).*The United State and New Zealand: Perspective on a Pacific Partnership*.Full Bright: New Zealand.

Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kebijakan *Washington Declaration* yang berisi tentang kerja sama antara negara di bidang keamanan yang berbeda dengan kerangka ANZUS. Kerja sama ini mengedepankan independensi dari masing – masing pihak sebagai penghormatan terhadap kedaulatan negara. Kebijakan *Washington Declaration* merupakan kerja sama yang berpijak pada pilar dan nilai dari kebijakan sebelumnya, yaitu kebijakan *Wellington Declaration*. Kebijakan *Washington Declaration* memiliki fokus untuk membahas isu tentang keamanan maritim, dan terorisme. Selain untuk membentuk kerangka kerja sama bilateral di bidang pertahanan, tujuan dibentuknya kebijakan kerja sama ini adalah untuk membentuk mekanisme dan mengidentifikasi area kerja sama antar negara. Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka diperlukan adanya dialog antar pemerintah dan kerja sama pertahanan dan keamanan.

Dialog antar pemerintah yang dimaksud adalah diskusi yang dapat menginisiasikan pertukaran ide dan pendapat antar kedua negara. Dialog antar pemerintah ini direalisasikan dengan adanya diskusi antar Menteri Pertahanan kedua negara. Amerika Serikat dan Selandia Baru akan menjadikan segala ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah Pasifik sebagai kepentingan nasional mereka. Kerja sama keamanan yang dilakukan akan fokus untuk mengidentifikasi ancaman dan menyusun resolusi konflik ancaman tradisional dan non tradisional di kawasan Pasifik. Untuk mencegah ancaman di kawasan Pasifik, maka kedua negara sepakat untuk meningkatkan kapabilitas maritim.

Selain itu kedua negara juga berkomitmen untuk saling meningkatkan kapabilitas militer masing – masing demi menciptakan lingkungan pasifik yang aman. Amerika dan Selandia Baru juga berkomitmen untuk selalu siaga dalam merespons potensi ancaman yang dinilai dapat mengganggu stabilitas keamanan di kawasan Pasifik, melakukan kerja sama militer lainnya, dan berkomitmen untuk saling menghargai kedaulatan negara masing-masing.



BAB V

ANALISIS KEBIJAKAN KEAMANAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP SELANDIA BARU MELALUI *WASHINGTON DECLARATION ON DEFENSE* PADA TAHUN 2012

Dalam menganalisis Kebijakan Pertahanan Amerika Serikat terhadap Selandia Baru melalui *Washington Declaration On Defense* pada tahun 2012 tidak terlepas dari adanya faktor internal dan eksternal Amerika Serikat yang memiliki pengaruh signifikan dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, penulis akan memberikan paparan tentang analisis Kebijakan Pertahanan Amerika Serikat terhadap Selandia Baru melalui *Washington Declaration On Defense* pada tahun 2012 melalui pembahasan sesuai indikator penelitian yang penulis angkat sesuai pada Bab II penelitian ini.

5.1 Feedback

Dalam Konsep *Foreign Policy Analysis* salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu kebijakan luar negeri adalah adanya *feedback* dari suatu kebijakan sebelum atau sesudah kebijakan tersebut dikeluarkan. Dalam isu yang penulis angkat, terbentuknya kebijakan luar negeri *Washington Declaration on Defense* tahun 2012 adalah karena adanya *fee back* dari kebijakan *Wellington Declaration* yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Selandia baru pada tahun 2010. Penulis melihat jika kebijakan *Wellington Declaration* merupakan kunci terbentuknya kebijakan *Washington Declaration on Defense*.

Wellington Declaration ditandatangani di Selandia Baru oleh Menteri Luar Negeri kedua negara, Hillary Clinton dan Murray McCully pada tanggal 5 November 2010.¹ Kebijakan ini di inisiasikan oleh pihak Amerika setelah hampir 30 tahun tidak bekerja sama dalam bidang keamanan karena Amerika Serikat memutuskan hubungan aliansi nya dengan Selandia Baru. Kebijakan ini merupakan usaha kedua negara dalam membuka babak baru dalam hubungan kedua negara yang lebih dekat dan membentuk kerangka kerja bagi kemitraan strategis untuk membentuk kerja sama praktis di masa depan dan dialog politik.²

Tujuan Deklarasi Wellington adalah untuk memperkuat kerja sama antara AS dan SB dalam abad 21 yang fleksibel, dinamis yang mencerminkan keyakinan dan aspirasi fundamental dari kedua negara. Kebijakan *Wellington Declaration* mengangkat dan membahas isu di kawasan Asia-Pasifik, menjaga lingkungan, perubahan iklim, menjaga stabilitas wilayah Pasifik, keamanan dan pemerintahan, membasmi terorisme dan melawan proliferasi senjata nuklir di kawasan Asia-Pasifik dan serta membahas isu perdagangan secara internasional melalui WTO dan secara regional melalui APEC. Yang mana isi dari kebijakan ini mengikat kedua negara untuk berkerja sama dalam berbagai masalah yang menjadi perhatian bersama.³

¹ US-NZ Council.(2010). "*Wellington Declaration*". Diakses pada tanggal 05 April 2018 dari: <http://usnzcouncil.org/us-nz-issues/wellington-declaration/>

² R0B.(2010) "*The Wellington Declaration*" Diakses pada tanggal 05 April 2018 dari: <https://thestandard.org.nz/the-wellington-declaration/>

³ New Zealand Foreign Affairs and Trade. *Op.cit*

Sejatinya *Wellington Declaration* merupakan kebijakan yang tidak formal karena kebijakan ini tidak menghasilkan serta membahas perjanjian antara kedua negara, *Wellington Declaration* hanya berupa dialog politik antar kedua menteri luar negeri Selandia Baru dan Sekretaris Negara Amerika Serikat. Namun berkat adanya kebijakan *Wellington Declaration* membuka peluang kedua negara untuk menjalin hubungan diplomasi yang lebih intense. Kebijakan *Wellington Declaration* merupakan gerbang dari terbentuknya kebijakan *Washington Declaration on Defense*, karena setelah dua tahun kebijakan *Wellington Declaration* terbentuk Amerika Serikat berinisiasi untuk melakukan kerja sama pertahanan dengan Selandia Baru melalui kerangka kebijakan *Washington Declaration on Defense* yang mana isi dari kebijakan tersebut merupakan turunan dari isi dialog politik yang terkandung di dalam *Wellington Declaration*.

5.2 Global Condition

Apa yang terjadi di dalam sistem internasional akan memberikan pilihan bagi para pembuat kebijakan. *Global Condition* adalah sebuah variabel yang membahas mengenai kejadian atau perubahan yang terjadi diluar teritori sebuah negara, sehingga dapat mempengaruhi para pembuat kebijakan untuk merespons kejadian-kejadian tersebut. Menurut Charles Kegley, terdapat tiga indikator dalam *Global Condition* yang mempengaruhi terbentuknya suatu kebijakan, tiga indikator tersebut akan penulis jelaskan sebagai berikut :

5.2.1 Global Trend

5.2.1.1 Bencana Alam

Faktor *Global Trend* adalah indikator yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam sistem internasional, dan menjadi perhatian banyak negara, dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. *Global Trend* dapat berupa isu terorisme, *global warming*, pengembangan energi nuklir, krisis HIV/AIDS, dan lainnya. Dalam kasus penelitian yan penulis angkat, penulis menjadikan isu bencana alam sebagai subjek penelitian.

Penulis mendapatkan data bahwa isu yang mempengaruhi dikeluarkannya kebijakan *Washington Declaration of Defense* oleh Amerika Serikat terhadap Selandia Baru adalah isu bencana alam. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Amerika Serikat dalam melakukan pergeseran kebijakannya untuk lebih dekat dengan Asia-Pasifik, hal ini dikarenakan kawasan Asia Pasifik memiliki tingkat

kerawanan akan bencana alam yang tinggi. Penulis mendapatkan data bahwa dalam 10 tahun terakhir, terdapat lebih dari 1.600 kasus bencana alam di kawasan Asia Pasifik atau jumlah tersebut setara dengan 40% kasus bencana alam yang terjadi di dunia menimpa kawasan Asia Pasifik, jika di total terdapat 500.000 korban jiwa dari kejadian tersebut.⁴ Dalam wilayah Pasifik terdapat 9.811 korban jiwa dan sembilan juta jiwa yang mengalami kerugian dari kasus bencana alam yang terjadi.⁵

Pada 29 September 2009, terjadi bencana tsunami yang besar dengan tinggi mencapai enam meter yang menyerang beberapa negara di kawasan Pasifik Selatan yakni: Samoa, Tonga, dan American Samoa dimana akibat kejadian terdapat 140 korban jiwa yang meninggal dunia. Tsunami tersebut dipicu oleh adanya gempa bumi dengan kekuatan 8,9 SR.⁶ Dengan adanya bencana gempa yang dahsyat dan jumlah korban jiwa yang banyak membuat beberapa negara mengalami kerugian.

Salah satu negara yang terpuak dengan peristiwa tersebut adalah Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan negara American Samoa yang merupakan negara teritori AS juga mendapatkan efek dari bencana ini. Penulis mendapatkan data bahwa terdapat 24 warga American Samoa yang meninggal akibat bencana ini. Setelah bencana Tsunami tersebut mengguncang Pasifik Selatan, Obama

⁴ Yakupitiyage, T. (2015). Asia-Pacific Most Disaster-Prone Region, Says New Study | Inter Press Service. **Diakses pada tanggal** 25 Juli 2017 **dari:** <http://www.ipsnews.net/2015/10/asia-pacific-most-disaster-prone-region-says-new-study/>

⁵ Pacific Islands: Disaster Risk Reduction and Financing in the Pacific. (2012). **Diakses pada tanggal** 25 Juli 2017 **dari** <http://www.worldbank.org/en/results/2012/04/01/pacific-islands-disaster-risk-reduction-and-financing-in-the-pacific>

⁶ Gaglioti, F. (2009). Tsunami hits several South Pacific countries. **Diakses pada tanggal** 25 Juli 2019 **dari:** <https://www.wsns.org/en/articles/2009/10/paci-o01.html>

merespons kejadian tersebut dengan menyebutkan bahwa bencana tersebut merupakan bencana yang berdampak besar bagi Amerika Serikat, Presiden Obama juga memerintahkan untuk mengirimkan bantuan tenaga medis dan finansial untuk membantu memulihkan bangunan yang rusak akibat bencana tersebut.⁷

Amerika Serikat sangat menaruh perhatian dalam isu bencana alam. Khususnya bencana alam yang berada di kawasan Pasifik, hal ini dikarenakan Amerika Serikat memiliki beberapa teritori di kawasan Pasifik seperti American Samoa, Hawaii, Guam, Jarvis Island, Midway, Wake Island, dan lainnya yang terletak di kawasan rawan bencana alam. Di kepulauan Hawaii, pemerintah Amerika Serikat juga memiliki *Pacific Disaster Center* (PDC) yang merupakan sebuah lembaga untuk memberikan informasi, dan bantuan khusus untuk mengurangi efek bencana alam.⁸ PDC dibentuk sejak setelah kejadian Tsunami besar melanda kawasan Pasifik dan dikelola oleh *University of Hawaii* yang bekerja sama dengan *The Office of the Under Secretary of Defense for Policy*.

Kecenderungan AS untuk mengawal wilayah pasifik di latarbelakangi oleh adanya aktivitas ekonomi antara Amerika Serikat dengan negara-negara di kawasan pasifik yang berupa ekspor – impor, dan *foreign direct investment* yang di sasar oleh AS ke wilayah Pasifik Selatan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya *press release* yang dikeluarkan oleh pemerintah AS dibawah mandat

⁷ The White House. (2009). “*President Obama Declares a Major Disaster Exists in American Samoa*”. Diakses pada tanggal 25 Juli 2019 dari: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/president-obama-declares-a-major-disaster-exists-american-samoa>

⁸ PDC. Diakses pada tanggal 25 Juli 2018 dari: <https://www.pdc.org/about/>

Presiden Barrack Obama saat bencana Tsunami tersebut terjadi. Dalam *press release* tersebut disebutkan bahwa bagi para pebisnis yang terkena dampak dari Tsunami dapat melaporkannya ke *Federal Emergency Management Agency* (FEMA).⁹

Dari penjelasan diatas penulis menganalisa bahwa kebijakan luar negeri *Washington Declaration on Defense* yang dikeluarkan Amerika Serikat terhadap Selandia Baru pada tahun 2012 dipengaruhi oleh adanya isu bencana alam yang sangat mengancam keamanan negara – negara Pasifik, hal ini dikarenakan jika isu bencana alam tidak segera ditanggulangi dengan cepat akan menyebabkan kerugian bagi negara- negara Pasifik, terutama bagi Amerika Serikat yang memiliki banyak FDI yang di investasikan di kawasan Pasifik selain itu dengan adanya perhatian Amerika Serikat dalam isu bencana alam akan membantu dalam menanggulangi adanya imigran yang masuk ke wilayah Amerika Serikat, pasalnya banyak negara di kawasan pasifik yang terancam tenggelam karena kenaikan air laut setiap tahunnya jika hal tersebut terjadi banyak imigran Pasifik yang mengungsi ke Amerika Serikat karena letaknya yang berdekatan.

Sehingga dengan dikeluarkannya kebijakan luar negeri *Washington Declaration on Defense* akan membantu Amerika Serikat untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan melindungi para investor Amerika Serikat di kawasan Pasifik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Pasal III dalam ayat C dan ayat F kebijakan *Washington Declaration on Defense* yang menyebutkan bahwa kedua negara akan bersama sama memperkuat kesadaran Regional untuk

⁹ The White House. *Op.Cit*

meningkatkan keamanan regional yang terkait dengan masalah seperti bencana alam.¹⁰

5.2.1.2 Terorisme

Penulis mendapatkan data bahwa isu yang mempengaruhi dikeluarkannya kebijakan *Washington Declaration of Defense* oleh Amerika Serikat terhadap Selandia Baru adalah isu terorisme. Hal ini tidak dapat di pungkiri karena pasca Amerika Serikat mendapatkan serangan 9/11, pemerintah Amerika Serikat sangat gencar dalam memberantas terorisme melalui *war in terror* yang di sebarakan oleh Presiden Josh Bush. Hal ini dikarenakan setelah insiden 9/11 terjadi isu terorisme semakin meningkat dan berkembang pesat khususnya bagi kelompok ekstremis Al-Qaeda yang semakin menyebarkan kekuatannya di berbagai belahan dunia, terutama di daerah Asia Pasifik.¹¹

Merujuk data yang diperoleh dari Global Research, peningkatan kasus dan penyebaran terorisme kelompok Al-Qaeda di kawasan Asia- Pasifik semakin meningkat, hal ini dikarenakan banyak negara di kawasan Asia-Pasifik yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga memudahkan kelompok teroris tersebut untuk menyebarkan ideologi mereka. Tindak kejahatan terorisme di kawasan Asia – Pasifik mengalami peningkatan di tahun 2001 dimana terdapat 700 kejadian, dan kejahatan terorisme di kawasan Asia – Pasifik sempat mengalami penurunan di angka 500 kasus pada tahun 2002 hingga tahun 2005,

¹⁰ Washington Declaration On Defense Cooperation

¹¹ Central Intelligence Agency (CIA) USA.(2006). “*National Strategy for Combatting Terrorism*”. Diakses pada tanggal 10 Februari 2018 dari: <https://2001-2009.state.gov/s/ct/rls/wh/71803.htm>

berdasarkan analisis penulis penurunan tersebut terjadi dikarenakan adanya kebijakan *War on Terror* dimana Amerika Serikat sangat fokus untuk memberantas terorisme setelah kejadian 9/11. Namun menginjak tahun 2007 aksi terorisme di kawasan Asia – Pasifik mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dimana kasus terorisme mencapai 2.500 kasus pada tahun 2010.

Amerika Serikat dan Selandia Baru sendiri memiliki kepentingan yang sama dalam memberantas terorisme. Terbukti setahun setelah amerika serikat mengeluarkan kebijakan *War on Terror*, Selandia baru merespons positif kebijakan tersebut dengan mengeluarkan Undang Undang anti terorisme pada tahun 2002.¹² Dengan adanya Undang-undang tersebut membuat aktivitas terorisme di Selandia Baru menjadi sangat sulit untuk disebar dan sulit bagi anggota teroris dalam merekrut anggota baru karena dengan adanya Undang-Undang ini memberikan wewenang bagi perdana menteri untuk memberikan hukuman. Dengan terbentuknya undang –undang anti terorisme tersebut secara tidak langsung Selandia Baru berpihak kepada Amerika Serikat, karena telah merespons kebijakan Josh Bush.

Selain itu, pada tahun Selandia Baru pada tahun 2002 memerintahkan juga mengerahkan kapal patroli HMNZS ke Taha untuk berpatroli di wilayah Laut Arab dan Teluk Oman bersama *Coalition Task Grup* yang dipimpin oleh Kanada dalam misi *Operation Enduring Freedom* yang dilaksanakan oleh Pemerintah

¹² Terrorism Suppression Amendment Act 2007

Amerika Serikat.¹³ Selanjutnya, pada tahun 2003 Selandia Baru mengirimkan kapal patroli Ta Ma yang bertugas untuk mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi tentang anggota Taliban dan Al-Qaeda. Perdana Menteri Selandia Baru, menyatakan bahwa Selandia Baru akan terus berusaha memberantas terorisme, hal terbukti dengan dukungan Selandia Baru dalam *Operation Enduring Freedom* berlanjut hingga tahun 2009, jika di kalkulasikan terdapat lebih dari 500 pasukan militer.¹⁴ Dimana pada tahun 2009 Pemerintah Selandia Baru juga turut mengirimkan bantuan pasukan militer berupa *Special Air Services*. Menurut pernyataan Perdana Menteri Selandia Baru, John Key, bantuan SAS tersebut diadakan atas permintaan resmi dari Amerika Serikat pada bulan april 2009.¹⁵ Dengan adanya dukungan yang diberikan oleh Selandia Baru dalam OEF di Afghanistan membuat hubungan kedua negara mulai mencair, setelah hampir 30 tahun mengalami kemunduran.

Dari data yang diperoleh penulis diatas, menunjukkan bagaimana isu terorisme menjadi sebuah *Global trend* karena setiap tahunnya terjadi peningkatan kasus terorisme, khususnya di kawasan Asia – Pasifik, oleh sebab itu Amerika Serikat sangat memberikan perhatian terhadap kawasan Asia – Pasifik dalam mencegah meluasnya kejahatan terorisme. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kedua negara memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin memerangi terorisme, oleh sebab itu Amerika Serikat berinisiatif untuk

¹³ Clark, Helen.(2002). "NZ Navy and Air Force Join International Campaign Against Terrorism.. **Diakses pada tanggal** 18 April 2018 **dari:** <https://www.beehive.govt.nz/release/nz-navy-and-air-force-join-international-campaign-against-terrorism>.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Peters, Tom.(2009). "US requests New Zealand SAS troops for war in Afghanistan". **Diakses pada tanggal:** 09 Maret 2018, **pada:** <https://www.wsns.org/en/articles/2009/04/newz-a30.html>

mengeluarkan sebuah kebijakan keamanan *Washington Declaration on Defense* pada tahun 2012 dengan Selandia baru untuk mencegah kejahatan terorisme hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya keterangan dari Menteri Pertahanan Selandia Baru yang menyatakan bahwa *Washington Declaration on Defense* merupakan sebuah Deklarasi kerja sama yang lebih besar dalam keamanan maritim, *counter - terorisme*, bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana di kawasan Pasifik serta juga mempromosikan inisiatif dukungan perdamaian ,dalam *Washington Declaration on Defense* juga dijelaskan bahwa kedua negara akan mengadakan sebuah kerja sama keamanan dimana masing – masing pihak akan melawan ancaman keamanan tradisional maupun non-tradisional, termasuk terorisme.

5.1.2 Polarisasi

Pada variabel *Global Condition* selanjutnya, disebutkan bahwa polarisasi pada sistem internasional mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan dikeluarkan. Penulis mendapatkan data bahwa dalam konteks hubungan internasional, polarisasi kekuatan politik global telah melemah semenjak perang dingin selesai, karena muncul beberapa negara yang memiliki pengaruh yang cukup kuat sehingga kekuatan global terpusat pada beberapa kekuatan, seperti munculnya China, Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan lainnya yang memiliki kekuatan yang cukup besar dalam menyaingi Amerika Serikat, oleh sebab itu sistem internasional berubah menjadi multi polar. Dengan demikian, tercipta pola hubungan antar negara yang baru, dimana suatu hubungan antar negara di

fokuskan pada kepentingan geo-ekonomi dan geo-politik dari masing-masing negara yang bertujuan untuk menjalankan kepentingan nasionalnya.¹⁶

Setelah berakhirnya perang dingin, pola aliansi Amerika Serikat juga berubah, Amerika Serikat lebih tertarik untuk menjalin hubungan kerja sama yang tidak terikat secara formal dibawah payung aliansi. Oleh sebab itu Amerika Serikat menjalin banyak hubungan yang tidak formal dengan beberapa negara di beberapa area, yaitu inisiatif keamanan proliferasi nuklir dan di kawasan Regional ASEAN dengan fokus bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana. Contohnya saja pada tahun 2005, Amerika Serikat menjalin kerja sama dengan Singapura yang bernama *Strategic Framework Agreement* namun kerja sama tersebut merupakan kerja sama yang sangat krusial di kawasan ASEAN dan jauh lebih progresif daripada aliansi Amerika Serikat dengan Thailand.¹⁷

Pada tahun 2008 lahir kekuatan baru yang mendominasi kawasan Asia Pasifik , dimana kawasan tersebut digunakan menjadi arena persaingan diplomatik oleh China dan Taiwan. Dalam beberapa tahun, tampaknya Cina telah meningkatkan bantuannya dan keterlibatan dengan Pasifik untuk mengejar kepentingan lain juga. Selain mencari daya ungkit diplomatik melalui kawasan itu, Cina dianggap berusaha mendapatkan akses ke sumber daya, termasuk mineral, kayu, dan ikan, dan memperluas pengaruhnya di kawasan itu. Program bantuan China ke Pasifik tampaknya signifikan. China dianggap sebagai donor

¹⁶ Rolfe, J. (1997). *New Zealand's security*. Wellington, N.Z.: Centre for Strategic Studies, Victoria University of Wellington. Halaman 8.

¹⁷ Young, Audrey.(2012).” *Back to being friends with benefits*”. Diakses pada tanggal 04 Mei 2017 dari: https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10814951

bantuan terbesar ketiga ke Pasifik setelah Australia dan Amerika Serikat, dan diperkirakan berkontribusi sekitar US \$ 200 juta dibandingkan dengan sekitar US \$ 1 miliar dalam bentuk bantuan Australia ke wilayah tersebut.¹⁸

Menanggapi kemunculan kekuatan China di Pasifik, Selandia Baru menyatakan minatnya untuk bekerja dengan Cina dalam proyek-proyek bantuan di Pasifik. Hal ini dibuktikan dengan adanya penandatanganan kerja sama *Free Trade Agreement* (FTA) pada tahun 2009.¹⁹ Amerika Serikat melihat hal ini sebagai cara yang dapat membantu menarik Cina ke dalam postur kolaboratif di wilayah tersebut.

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa sistem internasional yang sebelumnya bipolar antara Amerika Serikat dan Uni Soviet (Rusia) berubah menjadi uni polar, setelah perang dingin usai dan membuat Amerika Serikat menjadi satu satunya *Great Power* dalam hubungan internasional namun keadaan tersebut hanya sementara, hal ini dikarenakan muncul beberapa kekuatan baru yang membuat sistem polarisasi menjadi multi polar. Kegley menyebutkan jika sistem polarisasi multi polar dimana sumber kekuasaan tidak terfokus pada satu kutub saja, maka hubungan antar negara juga berubah, dimana negara-negara dapat lebih siap memilih dan menyusun kebijakan luar negeri yang tidak bergantung pada keinginan pihak yang berkuasa atau *great power*²⁰. Oleh sebab itu, Amerika Serikat dapat dengan bebas menjalin hubungan kerja sama dengan

¹⁸ Vaughn, Bruce. (2012). "The United States and New Zealand: Perspectives on a Pacific Partnership". Full Bright: New Zealand. Halaman 34

¹⁹ *Ibid.* Halaman 13

²⁰ Kegley, William Charles. *Op. Cit.* Halaman 216

banyak negara guna untuk meraih kepentingan nasionalnya di tengah sistem yang multi polar, dimana hubungan tersebut tidak didasari oleh kepentingan militer namun lebih di latarbelakangi oleh alasan geo-politik dan geo-ekonomi.

Penulis menganalisis bahwa alasan dikeluarkannya kebijakan keamanan *Washington Declaration of Defense* yang dikeluarkan Amerika Serikat terhadap Selandia Baru, di latarbelakangi oleh alasan Amerika yang menjadikan Selandia Baru sebagai pivot area nya, hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan resmi dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang mengatakan bahwa pergeseran fokus kebijakan Amerika Serikat di kawasan Asia –Pasifik karena Amerika menyadari pentingnya isu keamanan dan maritim di kawasan tersebut serta untuk menanggapi kebangkitan China yang telah menyebarkan pengaruhnya dalam kawasan Pasifik. Bukti perubahan arah kebijakan ini juga diperkuat dengan adanya penarikan mundur pasukan militer AS dari Iraq pada tahun 2011.²¹ Seperti yang kita ketahui sebelumnya pada masa pemerintahan George Bush, kebijakan AS sangat fokus pada Timur Tengah, namun pada masa pemerintahan presiden Obama, AS sangat mendekati Asia –Pasifik. Namun walaupun hubungan yang dijalin tidak didasari dengan hubungan aliansi, tetapi hubungan antara Amerika Serikat dan Selandia Baru dinilai menjadi salah satu hubungan paling penting di kawasan itu, seperti yang dilakukan Amerika Serikat dengan Singapura.²²

²¹ Landler, M. (2018). *U.S. Troops to Leave Iraq by Year's End, Obama Says*. Diakses pada tanggal 20 Maret 2018 dari: Nytimes.com. tersedia di: <http://www.nytimes.com/2011/10/22/world/middleeast/president-obama-announces-end-of-war-in-iraq.html>.

²² Young, Audrey.(2012). "Op.Cit.

Dengan demikian kebijakan *Washington Declaration on Defense* dengan Selandia Baru dibentuk atas dasar latar belakang geo-politik Amerika yang menjadikan Selandia Baru sebagai pivot area nya dan kebijakan tersebut dibentuk untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat di kawasan Selandia Baru, dimana pada saat itu China bangkit, sehingga walaupun Amerika Serikat tidak beraliansi dengan Selandia Baru namun kedua negara dapat bersikap fleksibel tanpa takut terjadi adanya intervensi yang mengikat dan menghindari kejadian yang sebelumnya yang terjadi dalam aliansi ANZUS tidak terulang kembali.

5.1.3 Posisi Geo strategi

Konsep *Foreign Policy Analysis* memberikan penjelasan bagaimana posisi geo strategi suatu negara dapat mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan luar negeri terbentuk.²³ Kegley menyebutkan bahwa dalam geo strategi ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan yaitu : lokasi geografi suatu negara, sumber daya alam, dan kondisi fisik lingkungan ketiga aspek tersebut lalu diproyeksikan terhadap negara lain. Dalam hal ini penulis melakukan analisis posisi geo strategi yang dimiliki oleh Amerika yang diproyeksikan terhadap Selandia Baru, sehingga mempengaruhi kebijakan *Washington Declaration of Defense* terbentuk.

²³ Kegley, William Charles & Shannon L. Blanton.(2010). *Op.cit.* Halaman 217-218

Selandia Baru memiliki posisi geo strategi yang menguntungkan yang nyaris terisolasi, posisi terpencil tersebut telah mempengaruhi posisi strategis dan yang sangat stabil dalam menjalankan kebijakan luar negerinya.²⁴ Selain itu letak geografi Selandia Baru, yang terisolasi merupakan aset besar dalam meminimalkan ancaman keamanan tradisional. Selain itu, Selandia Baru juga dikelilingi oleh dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Lau Tasman, kondisi geografis yang terisolasi dan dikelilingi oleh dua lautan tersebut membuat Selandia Baru memiliki wilayah maritim yang dua puluh kali lebih besar dari total daratan Selandia Baru. Sehingga, Selandia Baru diakui memiliki salah satu domain maritim terbesar di semua negara pantai, dengan Zona Ekonomi Eksklusif terbesar keempat di dunia.²⁵

Pada saat masa pemerintahan Presiden Obama, Amerika Serikat Amerika melakukan pergeseran arah kebijakan luar negeri dan keamanan negara ke kawasan Asia – Pasifik, dan fokus untuk lebih mendekatkan diri dengan negara Asia-Pasifik.²⁶ Melalui pernyataan menteri luar negeri AS, Hillary Clinton dalam artikel yang berjudul *America's Pacific Century* yang menyebutkan bahwa pergeseran atau redifinisi lingkungan geo strategis (*geo strategic space*) Amerika Serikat di kawasan Asia-pasifik, karena AS melihat semakin pentingnya jalur maritim serta keamanan di kawasan tersebut²⁷ Clinton juga menyatakan bahwa AS menjadikan Pasifik sebagai pivot area untuk kebijakan luar negeri Amerika

²⁴ Vaughn, Bruce. (2012). "Op.cit. Halaman 3

²⁵ Powles, Anna. " *Finding Common Ground: New Zealand and Regional Security Cooperation in the Pacific*". APCSS. Halaman 92

²⁶ Vaughn, Bruce.(2012). "Op.cit. Halaman 17

²⁷ *Ibid.* Halaman 16

Serikat. Bahkan Obama juga menyatakan bahwa dirinya adalah Presiden dari Asia Pasifik, saat menjalankan kunjungan kenegaraan di Jepang.²⁸

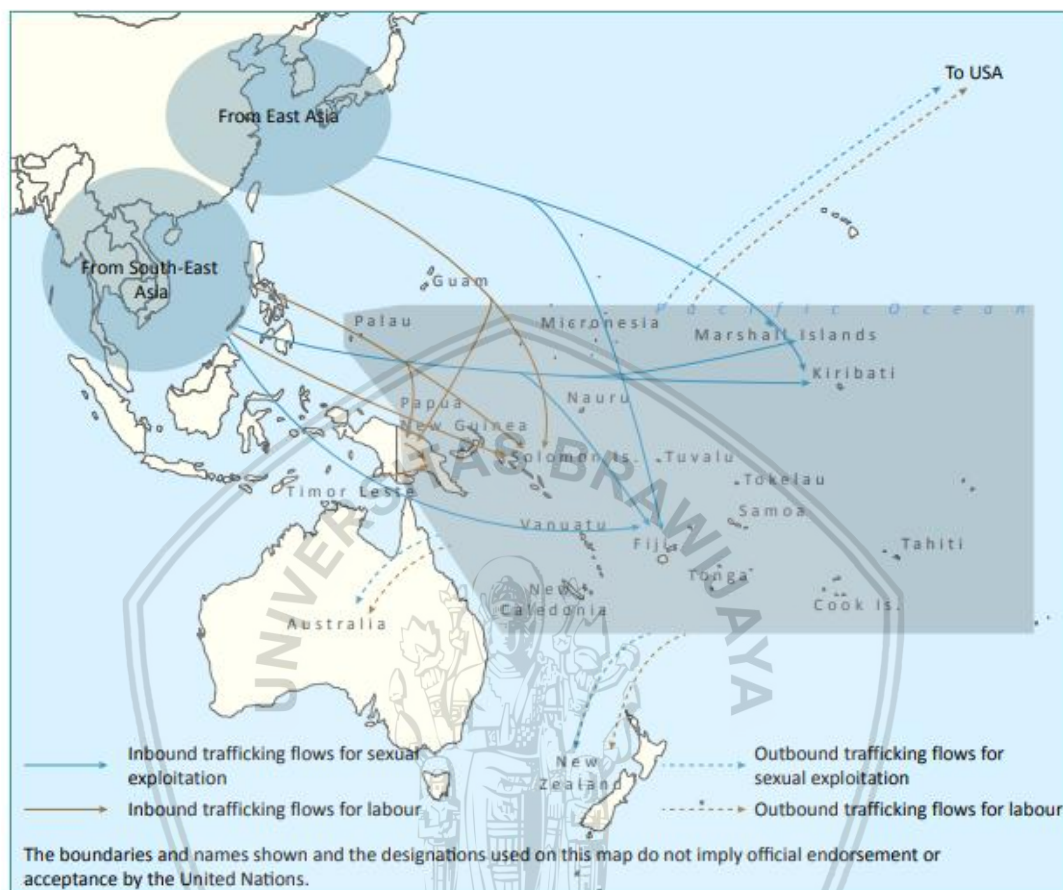
Penulis mendapatkan informasi bahwa, Samudera Pasifik memiliki tingkat kejahatan yang tinggi seperti *illegal fishing*, *human trafficking* dan *migrant smuggling*.²⁹ Pemerintah Amerika Serikat sangat menaruh perhatiannya dalam isu *human trafficking* dan *migrant smuggling* hal ini dikarenakan banyak dari pelaku *human trafficking* dan *migrant smuggling* yang menjadikan Amerika Serikat dan Selandia Baru sebagai negara tujuan mereka, dengan banyaknya tingkat kejahatan *human trafficking* dan *migrant smuggling* yang berasal dari kawasan Pasifik akan berimplikasi pada jumlah imigran ilegal yang masuk kedalam negara Amerika Serikat dan Selandia Baru sehingga akan mengancam keamanan nasional kedua negara. Berikut adalah peta bersebaran kejahatan trans-nasional *human trafficking* dan *migrant smuggling* yang terjadi di kawasan pasifik :

²⁸ The Press. (2009). "Obama calls himself 'America's first Pacific president'". *NY Daily News*. Diakses pada tanggal 5 April 2018, dari: <http://www.nydailynews.com/news/world/obama-calls-america-pacific-president-hails-expanded-engagement-asia-article-1.414495>

²⁹

GAMBAR 2

Peta Persebaran *Human Trafficking* dan *People Smuggling* di Kawasan



Sumber: UNODOC. (2016). "Transnational Organized Crime in the Pacific: A Threat Assessment". Halaman : 38

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa alasan yang mendasari Amerika Serikat dalam mengeluarkan kebijakan *Washington Declaration On Defense* Pada Tahun 2012 terhadap Selandia Baru, adalah karena adanya faktor *geo strategi* dari Selandia Baru dimana penulis menganalisa bahwa Amerika Serikat menjadikan kawasan Asia Pasifik sebagai pivot area nya karena Amerika Serikat menyadari pentingnya isu keamanan yang dapat dibuktikan dengan adanya tingkat kejahatan trans-nasional berupa *illegal fishing*, *human*

trafficking, dan *migrant smuggling* yang tinggi serta pentingnya isu maritim di kawasan tersebut. Dan dalam rangka menjalankan geo strategi tersebut Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan *Washington Declaration on Defense* terhadap Selandia Baru dimana dalam deklarasi tersebut banyak menyinggung tentang keamanan maritim dan komitmen dari kedua Negara untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia- Pasifik, serta meningkatkan kerja sama bilateral di bidang keamanan terutama di bidang keamanan maritim. Dimana dalam teks *Washington Declaration on Defense* juga dijelaskan aktivitas yang diusulkan oleh kedua negara dalam menjalankan kerja sama bilateral dalam ranah Kerja sama Keamanan Maritim salah satunya adalah dengan cara bekerja sama dalam kegiatan keamanan dan keselamatan maritim dan berpartisipasi dalam latihan, operasi maritim, melaksanakan pelatihan bilateral dan multilateral, termasuk yang terkait dengan kontra-proliferasi, *counter*-terorisme, anti-pembajakan, mengatasi eksploitasi sumber daya regional, dan mendukung kebebasan perdagangan dan navigasi.³⁰

Oleh karena itu untuk menjaga kepentingan nasionalnya agar tetap berjalan, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan keamanan terhadap Selandia Baru, sesuai dalam teks *Washington Declaration On Defense* dijelaskan bahwa kedua negara diharapkan dapat membangun kapabilitas militer maritim kedua negara guna menjaga dan memperkuat keamanan nasional kedua negara.³¹

³⁰ Washington Declaration on Defense 2012

³¹ *Ibid.*

5.2 Internal Characteristics

Pada sub-bab ini penulis akan menganalisa bagaimana faktor domestik dari Amerika Serikat dalam mempengaruhi dikeluarkannya kebijakan keamanan *Washington Declaration on Defense* yang dikeluarkan pada tahun 2012. Kegley menyebutkan bahwa terdapat tiga variabel dalam faktor domestik yang mempengaruhi dikeluarkannya suatu kebijakan luar negeri yang akan penulis jelaskan sebagai berikut :

5.2.1 Kapabilitas Militer

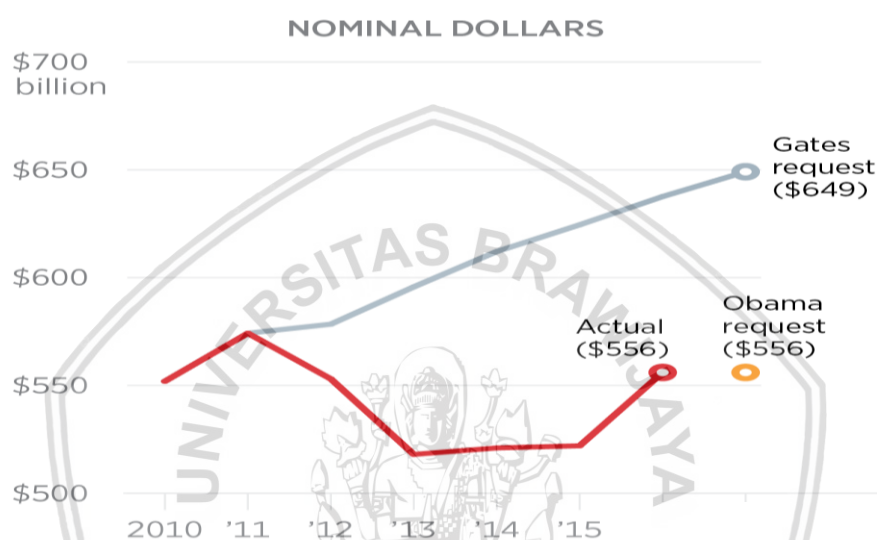
Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki kekuatan global dan kepentingan global. Militer yang dimiliki oleh AS memiliki peran utama untuk melindungi AS di luar dan di dalam negeri, serta melindungi sekutu AS. Selain itu militer AS juga harus mencegah musuh dan oportunis dalam mengambil tindakan yang akan menantang kepentingan AS, dan menjaga ancaman terhadap perdamaian dan keamanan Amerika dan sekutunya.

Data yang diperoleh oleh penulis menunjukkan bahwa anggaran dasar untuk pertahanan AS pada tahun fiskal (*Fiscal Years*) 2012 adalah \$ 548 miliar, yang dibayarkan untuk pasukan (tenaga kerja, peralatan, pelatihan); kemampuan seperti transportasi, satelit, intelijen pertahanan, dan penelitian dan pengembangan; dan dukungan kelembagaan (basis dan stasiun, fasilitas, rekrutmen, dan sejenisnya). Namun anggaran tersebut tidak termasuk anggaran untuk membayar operasi militer yang berlangsung di luar negeri, karena terdapat anggaran dana tambahan

tersendiri untuk operasi diluar negeri, anggaran tersebut bernama OCO (*overseas contingency operations*).

GRAFIK 1

Jumlah Pengeluaran Anggaran Pertahanan Amerika Serikat



Sumber: US Office of Management and Budget. *Budget of the United State Government, Fiscal Years 2012-2017: Summary Tables* (Washington DC: U.S. Government Printing Office, 2011-2016) Tabel S10, <https://www.gpo.gov/fdsys/brows/collectionGPO.action?collectionCode=BUDGET> (diakses pada tanggal 21 Maret 2018)

Dari grafik diatas dapat kita ketahui bahwa total anggaran pertahanan Amerika Serikat pada tahun fiskal 2012 mencapai \$ 548 miliar. Walaupun jumlah tersebut jauh dari anggaran yang di usulkan oleh Menteri Pertahanan AS, Robert Gates. Menurut analisis penulis hal ini terjadi dikarenakan dalam mengambil keputusan untuk membiayai pertahanan nasional harus sepadan dengan kepentingan dan ancaman yang berlaku, sehingga dengan demikian keputusan dalam menentukan anggaran dana pertahanan juga mencerminkan prioritas nasional dan penerimaan risiko.

Namun walaupun anggaran dana yang dikeluarkan jauh dari jumlah anggaran usulan, kekuatan militer Amerika Serikat sangat besar, bahkan penulis mendapatkan data jika AS merupakan negara dengan ranking pertama dari seluruh anggota NATO yang memiliki anggaran APBN militer terbesar, yakni 3.61% dari GDP AS di alokasikan untuk militer.³² Selain itu AS juga merupakan negara dengan ranking pertama di dunia sebagai negara dengan kekuatan militer yang besar, hal ini dibuktikan dengan jumlah personil militer mencapai 2.363.675 orang, selain itu kekuatan militer AS juga didukung dengan kepemilikan alat bantu perang seperti tank, aircraft, naval assets yang sangat canggih dan banyak..³³ Seperti contoh Amerika Serikat memiliki drone dan pesawat yang dapat dijalankan tanpa awak yang berjumlah lebih dari 700 pesawat serta memiliki tenaga nuklir.³⁴

Kemajuan militer Amerika Serikat juga didukung oleh pemerintahnya dimana Presiden Obama memiliki kebijakan yang dinamakan IT Knowledge Based yang merupakan kemampuan untuk mempelajari dan mengimplementasikan penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi seperti penggunaan satelit, GPS, komunikasi digital, sistem jaringan komputer dan fasilitas Internet kedalam satu sistem komando dan kendali terintegrasi medan tempur (*integrated battle field command & control system*), yaitu

³²The Heritage Foundation.(2017).”*Index of Military Strength, Global Assessment*”. Heritage.org. Halaman 71

³³*Globalfirepower* .(2017).”*United States Military Strength*”. Diakses pada tanggal 25 Maret 2018, dari: https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=united-states-of-america

³⁴ Militaryfactory (2018). “*United States Aircraft List (Current and Former Types)*”. Diakses pada tanggal 25 Maret 2018, dari: <https://www.militaryfactory.com/aircraft/by-country.asp?Nation=United%20States>



Dari peta diatas, dapat diketahui wilayah struktur komando pangkalan militer Amerika Serikat terdiri dari:

1. The Northern Command (NORTHCOM) yang terletak di wilayah Amerika Serikat dan negara sekitarnya. Pusat NORTHCOM adalah Pangkalan Angkatan Udara Peterson, yang terletak di negara bagian AS, Colorado.³⁷
2. The Pacific Command (USPACOM) yang terletak di wilayah benua Asia-Pasifik. Wilayah ini merupakan wilayah komando tertua dan terbesar, USPACOM berpusat di Kepulauan Hawaii.³⁸
3. The Southern Command (USSOUTHCOM) terletak di Amerika bagian tengah, Amerika Selatan, dan Karibia. Komando daerah ini memiliki tugas penting seperti menjaga jalur Panama, dan memiliki kantor pusat di Kota Doral, Florida.³⁹
4. The Central Command (CENTCOM) adalah sebuah komando yang terletak di wilayah Timur Tengah, komando ini sangat fokus di negara konflik seperti Afghanistan dan Iraq dan juga memiliki peran penting dalam perang Teluk, dan Perang Afghanistan. Pusat komando CENTCOM terletak di Kota Tampa, Florida tepatnya di Pangkalan Udara MacDill.⁴⁰

³⁷ United State Northern Command.(2018).”*About USNORTHCOM*”. ”. Diakses pada tanggal 25 March 2018, **dari:** <http://www.northcom.mil/About-USNORTHCOM/>

³⁸ United State Pacific Command.(2018).”*About USPACOM*”. Diakses pada tanggal 25 March 2018, **dari:** <http://www.pacom.mil/About-USPACOM/>

³⁹ United State Southern Command.(2018).”*About Us*”. Diakses pada tanggal 25 March 2018, **dari:** <http://www.southcom.mil/About/>

⁴⁰ United State Central Command. (2018). “*Mission, Vision & Strategic Approach*.” Diakses pada tanggal 25 March 2018, **dari:** 25 March 2018, from <http://www.centcom.mil/ABOUT-US/>

5. The European Command (EUCOM) yang terletak di kawasan Eropa dan memiliki kantor pusat di Stuttgart-Vaihingen, Jerman.⁴¹
6. The Africa Command (USAFRICOM) merupakan komando di wilayah Afrika, yang berpusat di Kelley Barracks, Stuttgart, Jerman. Komando ini memiliki tugas untuk melakukan operasi militer dalam konflik regional Afrika.⁴²

Dari penjelasan mengenai kapabilitas militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat, penulis menarik benang merah bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki kapabilitas militer yang sangat kuat. Jika dikaitkan dengan isu yang penulis angkat, penulis telah menjelaskan bahwa Amerika Serikat sedang melakukan pergeseran kebijakan dengan menjadikan Pasifik sebagai pivot area nya, aspek yang paling nyata dari strategi Pivot Pasifik dapat ditemukan dalam evolusi sikap pertahanan AS dan hubungan dengan Australia, Selandia Baru, Guam, Singapura, dan Filipina. Redefinisi Pivot tersebut juga merupakan upaya untuk mendistribusikan secara lebih luas pasukan AS di Asia dan untuk meningkatkan fleksibilitas mereka sambil meningkatkan kemampuan kerja sama. AS juga memiliki prioritas relatif yang lebih besar untuk Angkatan Laut dibandingkan dengan Angkatan Darat dengan mengumumkan rencana untuk melanjutkan dengan 11 kapal induk militer.⁴³

⁴¹ United States European Command. (2018). *Learn about EUCOM's vision and mission..* Diakses pada tanggal 25 March 2018, dari: <http://www.eucom.mil/about>

⁴² United States Africa Command. (2018). *"About the Command"*. Diakses pada tanggal 25 March 2018, dari: <http://www.africom.mil/about-the-command>

⁴³ Vaughn, Bruce. (2012). *Op.Cit* Halaman 18

Pergeseran dalam struktur kapabilitas militer AS secara nyata ditunjukkan dengan adanya sikap *rebalancing* AS terhadap Asia. Penulis mendapatkan data bahwa 60 persen dari Angkatan Laut AS akan berada di Pasifik termasuk operator tambahan untuk membawa total menjadi 6 operator di Pasifik. Obama juga merencanakan untuk menggeser pasukan AS dari Pangkalan Marinir Futenma di Okinawa ke kawasan Pasifik Selatan dengan mengirimkan 4.000 pasukan militer. Pengerahan militer ini menandakan signifikansi dari tekad Amerika Serikat untuk tetap terlibat di wilayah tersebut.⁴⁴

Amerika Serikat juga memiliki program *US Coast Guard Ship Rider* yang bertujuan untuk membantu melakukan kontrol terhadap perikanan mereka dan menangani penangkapan ikan ilegal. Kedua negara juga secara aktif mendukung negara kepulauan Pasifik dengan membantu mereka berpatroli di Zona Ekonomi Eksklusif mereka. Hal ini sesuai dengan Pasal III dalam kebijakan *Washington Declaration on Defense* yang menyebutkan bahwa kedua negara akan bersama sama memperkuat kesadaran Regional untuk meningkatkan keamanan regional yang terkait dengan masalah seperti bencana alam dengan cara melakukan kerja sama keamanan maritim.⁴⁵

Selain itu, Pemerintah Amerika Serikat juga mengalokasikan Anggaran Belanja Negaranya untuk dialokasikan terhadap kepentingan pertahanan AS. Dimana menurut data yang penulis dapatkan, AS telah meningkatkan anggaran belanja sektor militernya untuk kawasan Pasifik, anggaran AS pada tahun fiskal

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Washington Declaration On Defense Cooperation

2012 dimana kebijakan *Washington Declaration* dibentuk AS mengalokasikan 646 miliar dollar Amerika dengan 1,4 juta personel militer AS untuk kawasan Pasifik, dimana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 anggaran militer AS untuk kawasan Pasifik hanya sebesar 614 miliar dollar Amerika dengan jumlah 1.3 juta personel saja.⁴⁶ Dengan adanya alokasi APBN militer AS terhadap kawasan Pasifik yang besar, menunjukkan bahwa AS memiliki kepentingan yang besar di kawasan Pasifik.

5.2.2 Kondisi Ekonomi

Amerika Serikat merupakan negara kaya di dunia dengan keberagaman ekonomi, dan memiliki tingkat *economic freedom* tinggi di dunia yakni 75,7.⁴⁷ Walaupun pada tahun 2009 Amerika Serikat sempat mengalami krisis ekonomi, namun AS tetap bangkit dalam meningkatkan nilai *economic freedom*. Dari data yang penulis dapat, memaparkan jika AS mengalami kenaikan sebesar 0.6% setiap tahunnya di sektor *economic freedom* sehingga membuat AS menjadi negara dengan tingkat *economic freedom* tertinggi ke 2 di Benua Amerika.⁴⁸

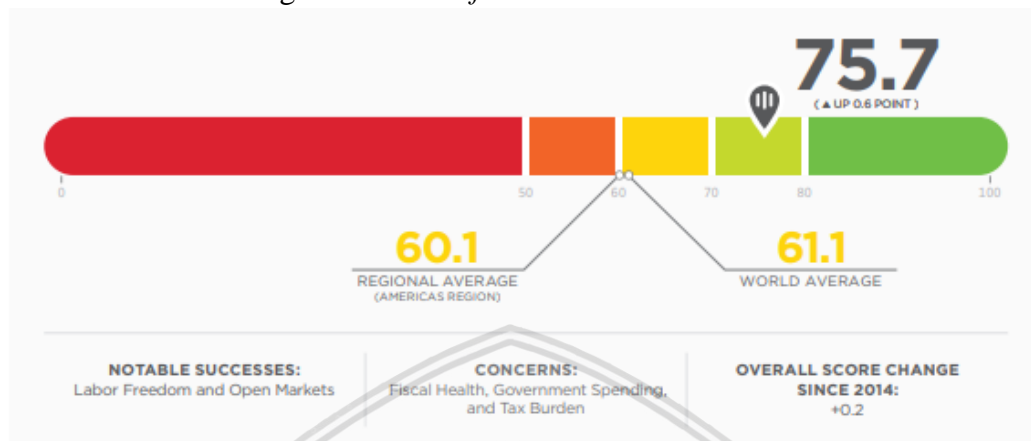
⁴⁶ *Ibid.* Halaman 19

⁴⁷ *Index of Economic Freedom*. (2018). *United States Economy: Population, GDP, Unemployment, Inflation, Spending*. Diakses pada tanggal 28 Maret 2018 dari : <https://www.heritage.org/index/country/unitedstates>

⁴⁸ *Ibid.*

GRAFIK 2

Tingkat *economic freedom* di Amerika Serikat



Sumber: The Heritage Foundation.(2018). "*Index of Economic Freedom, United States*". Halaman 426

Dari grafik yang diperoleh penulis diatas, menunjukkan bahwa tingkat *economic freedom* di Amerika Serikat diatas rata-rata tingkat *economic freedom* di dunia. *Economic freedom* yang dimiliki Amerika dikonsentrasikan pada sektor kesehatan, anggaran belanja pemerintah, dan beban pajak. Sehingga dengan adanya tingkatan *Economic freedom* yang tinggi membuat pertumbuhan perekonomian di Amerika Serikat berkembang karena Pemerintah Amerika Serikat membebaskan masyarakatnya untuk melakukan aktivitas produksi dan perdagangan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Sehingga dengan demikian banyak para investor dari luar Amerika tertarik untuk menginvestasikan modal dengan Amerika Serikat melalui perdagangan internasional.

Selain memiliki tingkatan *Economic freedom* yang tinggi, Amerika Serikat merupakan negara maju karena didukung dengan adanya jumlah penduduk yang besar, yaitu sekitar 314 juta jiwa pada tahun dengan GDP berjumlah 16.155.000

juta dollar pada tahun 2012. Jumlah tersebut meningkat drastis, mengingat pada tahun 2009 AS sempat mengalami krisis ekonomi dimana jumlah GDP yang dimiliki AS hanya berkisar 14.400.000 juta dollar.⁴⁹ Jumlah GDP yang sangat besar tersebut juga dilengkapi dengan kecilnya angka inflasi di Amerika Serikat yang hanya mencapai 1.3% per tahunnya, serta kecilnya angka pengangguran yakni hanya ada 4.9% dari populasi AS yang merupakan pengangguran.⁵⁰

Perekonomian AS didominasi oleh sektor jasa yang sangat maju dan berteknologi maju, dimana 80% pendapatan AS didapatkan dari sektor tersebut. Perekonomian AS didominasi oleh perusahaan yang berorientasi layanan di berbagai bidang seperti teknologi, layanan keuangan, perawatan kesehatan, dan ritel. Perusahaan-perusahaan besar AS juga memainkan peran utama di panggung global, dengan lebih dari seperlima perusahaan di Global Fortune 500 berasal dari Amerika Serikat.⁵¹

Amerika Serikat memiliki akses ke sumber daya alam yang melimpah dan infrastruktur fisik yang canggih. Selain itu, AS juga memiliki tenaga kerja yang besar, terdidik dan produktif. Modal fisik dan manusia sepenuhnya dimanfaatkan di pasar bebas dan lingkungan yang berorientasi bisnis. Pemerintah memberikan stabilitas politik, sistem hukum fungsional, dan struktur peraturan yang memungkinkan ekonomi berkembang. Populasi umum, termasuk keragaman imigran, membawa etika kerja yang solid, serta rasa kewirausahaan dan

⁴⁹ The World Bank. "United State". Diakses pada tanggal 28 Maret 2018 pada: <https://data.worldbank.org/country/united-states>

⁵⁰ *Index of Economic Freedom*. (2018). *Op.cit*

⁵¹ Focus Economic. (2018). "US Economic". Diakses pada tanggal 03 April 2018 pada: <https://www.focus-economics.com/countries/united-states>

pengambilan risiko untuk campuran. Pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat terus didorong oleh inovasi, penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan serta investasi modal.⁵²

Oleh karena itu, perdagangan internasional merupakan sektor penting dalam menyongkong perekonomian di Amerika Serikat yang dikonsentrasikan pada kegiatan ekspor dan impor. AS memainkan peran utama dalam sistem perdagangan internasional terutama sebagai pendukung pengurangan hambatan perdagangan dan perjanjian perdagangan internasional. Amerika Serikat saat ini memiliki banyak perjanjian perdagangan internasional. Diantaranya adalah Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), yang dibuat bersama dengan Kanada dan Meksiko pada tahun 1994. Amerika Serikat juga merupakan anggota aktif Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).⁵³ Di wilayah Asia-Pasifik Amerika Serikat memiliki beberapa kerja sama ekonomi seperti *Asia Pacific Economy Cooperation* (APEC) yang ditandatangani oleh beberapa negara Asia-Pasifik dan Amerika pada tahun 1989, Selandia Baru juga turut menandatangani perjanjian tersebut.⁵⁴

Pada masa pemerintahan Presiden Obama, Amerika Serikat bergabung dalam negosiasi *Trans Pacific Partnership*, dan menjadikan Selandia Baru sebagai *global supply chain* yang membuat Selandia Baru sebagai partner krusial dalam kegiatan perdagangan bebas Amerika Serikat. Alasan bergabungnya

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Asia-Pacific Economic Cooperation.” *What is Asia-Pacific Economic Cooperation?*” **Diakses pada tanggal** 3 April 2018 **pada:** <https://www.apec.org/About-Us/About-APEC>

Amerika Serikat dalam siding negosiasi TPP tersebut adalah untuk membendung kekuatan China yang menyebar dalam Selandia Baru, karena pada saat itu Selandia Baru merupakan satu-satunya Negara maju yang menjalin kerja sama *free trade agreement* dengan China. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat menganggap bahwa China merupakan manipulator nilai mata uang, dengan menjual komoditas impor yang sangat murah.⁵⁵ Penulis menganalisa bahwa keputusan Amerika untuk bergabung dalam negosiasi TPP adalah strategi Amerika Serikat dalam melindungi pasar perdagangan internasional Amerika Serikat, terutama di kawasan Selandia Baru yang merupakan penting dalam kegiatan ekspor komoditas Amerika Serikat. Dengan demikian kerja sama antara Selandia Baru dan China di bidang perdagangan bebas membuat Amerika khawatir jika komoditas ekspornya tidak laku karena bersaing dengan komoditas impor China yang berharga murah.

Menurut informasi yang penulis dapatkan, hubungan kerja sama ekonomi antara AS dan Selandia Baru tetap terjalin dengan baik walaupun kedua negara sempat mengalami permasalahan, terkait kebijakan anti nuklir yang digalakkan oleh Selandia Baru pada tahun 1984. Bahkan neraca ekspor –impor kedua negara meningkat dibandingkan pada tahun 1984, pada tahun 2012 jumlah perdagangan Selandia Baru dan Amerika Serikat mencapai 10 miliar dollar Amerika, jumlah tersebut terdiri dari total kegiatan ekspor AS ke Selandia Baru sebesar 5,2 miliar dollar AS, dan impor sebesar 5,3 miliar dollar AS. Jumlah perdagangan antara AS

⁵⁵ Norris, Zachary, D. (2012). "Why the American Election 2012 Matters in NZ ".**Diakss pada tanggal** 3 April 2018 **pada:** <http://nz-uslegal.co.nz/news-events-and-publications/publications/why-the-american-election-matters-in-nz/>

dan Selandia Baru tersebut mengalami kenaikan sebesar 74% dari tahun 2003.⁵⁶ Komoditi ekspor AS ke Selandia Baru sebagian besar adalah pesawat terbang dengan total 493 juta dollar AS dan mesin besar berkisar 457 dollar AS. Untuk dibidang agrikultur Amerika Serikat mengekspor susu dengan jumlah 119 juta dollar AS, buah segar 35 juta dollar AS, dan makanan siap saji sebesar 30 juta dollar AS.⁵⁷

Sementara untuk Selandia Baru sendiri, Amerika Serikat merupakan negara penting dalam kegiatan ekspor Selandia Baru. Amerika Serikat mendapatkan posisi tiga besar sebagai negara produk ekspor Selandia Baru, adapun komoditas yang di ekspor oleh Selandia Baru untuk AS didominasi oleh produk agrikultur, seperti daging sapi dengan total 652 dollar AS, Anggur berjumlah 226 dollar AS, dan susu dengan jumlah 312 dollar AS.⁵⁸

Seperti yang dikatakan Kegley, negara yang kaya, makmur dan memiliki tingkat industri yang tinggi cenderung akan mengembangkan kekuatannya di luar batas negaranya, dan biasanya negara kaya yang memiliki keterlibatan dalam perdagangan internasional juga cenderung memiliki kapabilitas militer yang sangat kuat. Sedangkan negara miskin dalam merespons kondisi global sangat

⁵⁶ Office of the United States Trade Representative. "New Zealand". Diakses pada tanggal 3 April 2018 pada: <https://ustr.gov/countries-regions/southeast-asia-pacific/new-zealand>

⁵⁷ New Zealand Foreign Affairs and Trade. "United State". Diakses pada tanggal 3 April 2018 pada: <https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/north-america/united-states-of-america/#Trade>

⁵⁸ New Zealand Trade and Enterprise. "Investment Statistics". Diakses pada tanggal 3 April 2018 pada: <https://www.nzte.govt.nz/investment-and-funding/investment-statistics>

bergantung pada negara lain yang lebih maju yang menjadikan mereka berada di hierarki terbawah dalam ekonomi global.⁵⁹

Dalam kasus yang penulis angkat dapat dilihat bahwa alasan Amerika Serikat dalam mengeluarkan kebijakan *Washington Declaration on Defense* adalah karena Amerika Serikat memiliki kepentingan ekonomi di Selandia Baru. Amerika Serikat juga berperan aktif dalam menginisiasikan perjanjian perdagangan internasional di beberapa wilayah, di kawasan Asia Pasifik sendiri Amerika Serikat bergabung dengan perjanjian APEC dan TPP. Hal tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menjaga kepentingan yang dimilikinya agar mereka bertahan sebagai negara yang berpengaruh serta untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya di ranah global terutama dalam menjadi komoditas ekspornya. Alasan lain yang melatarbelakangi Amerika Serikat kebijakan *Washington Declaration on Defense* karena Selandia Baru merupakan Negara dengan perekonomian yang sangat stabil, contohnya saja pada saat krisis global melanda pada tahun 2008 Selandia Baru berhasil menstabilkan kondisi perekonomian dalam negerinya dalam waktu hanya 3 bulan. Dengan demikian Selandia Baru memiliki kondisi perekonomian yang sangat stabil yang membuat para investor Amerika Serikat merasa aman dalam bekerja sama dengan Selandia Baru.⁶⁰

⁵⁹ Kegley, William Charles & Shannon L. Blanton. (2010). *Op.cit.* Halaman 220

⁶⁰ Bollard, Alan & Tim Ng. (2012). *"Learnings from the Global Financial Crisis"*. Diakses pada tanggal 3 April 2018 pada: <https://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Publications/Speeches/2012/4890771.pdf>. Halaman 2

5.2.3 Bentuk Pemerintahan

Pada indikator penelitian selanjutnya disebutkan bahwa bentuk pemerintahan sangat mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan dapat diputuskan. Berdasarkan konsep *Foreign Policy Analysis*, terdapat dua jenis bentuk pemerintahan yaitu Autokratik dimana segala bentuk urusan negara akan diputuskan oleh kepala negara sebagai *unitary actor*, dan yang kedua adalah demokratik, dimana terdapat banyak aktor lain selain kepala negara seperti partai politik, media massa, dan opini publik yang mempengaruhi sebuah kebijakan diputuskan.

Dalam kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa bagaimana bentuk pemerintahan di Amerika Serikat mempengaruhi terbentuknya kebijakan *Washington Declaration of Defense* oleh Amerika Serikat terhadap Selandia Baru pada tahun 2012. Seperti yang kita ketahui Amerika Serikat merupakan negara demokrasi, dimana sistem pemerintahan Amerika Serikat memiliki tiga pembagian kekuasaan yang terdiri dari:



pejabat tinggi pemerintah lainnya. Anggota kabinet di nominasikan oleh Presiden dan harus disetujui oleh mayoritas sederhana Senat.⁶¹

Yang kedua adalah Badan Legislatif, yang terdiri dari Kongres dan bertugas untuk menyusun undang-undang. Kongres dibagi menjadi 2 bagian yaitu 100 Senator, yang diwakili oleh 2 orang dari masing-masing negara bagian. Dan *House of Representatives* yang memiliki tugas untuk mendiskusikan ide dan memutuskan apakah ide-ide tersebut dapat menjadi undang-undang. Ada 435 Perwakilan. Jumlah wakil masing-masing negara ditentukan oleh populasinya.⁶²

Dan Badan yang terakhir adalah Yuridis, yang bertugas untuk mengartikan arti hukum, menerapkan hukum, dan memutuskan hukuman. Badan ini terdiri dari Mahkamah Agung dan pengadilan federal. Mahkamah adalah pengadilan tertinggi di Amerika Serikat. Hakim Mahkamah Agung dicalonkan oleh Presiden dan harus disetujui oleh senat.⁶³

Dengan adanya tiga pembagian kekuasaan ini dapat menciptakan *check and balances* dimana dari masing-masing badan akan saling mengawasi satu sama lain sehingga mencegah adanya kekuasaan yang berlebih dari satu badan dan menghindari terjadinya tirani.⁶⁴

Selain adanya pembagian kekuasaan, negara demokratik juga menganggap penting peran partai politik dalam mempengaruhi suatu kebijakan. Di Amerika

⁶¹ USA.gov. "Branches of Government". Diakses pada tanggal 03 April 2018 dari: <https://www.usa.gov/branches-of-government>

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Jillson, C. (2008). *American Government, Political Change and Institutional Development* (4th ed.). New York: Taylor & Francis Group, LLC..Halaman 31

Serikat terdapat dua partai politik besar yaitu: Demokrat dan Republik. Partai Demokrat didirikan dari partai Thomas Jefferson, dan dibentuk sebelum tahun 1800. Sedangkan Partai Republik didirikan pada tahun 1850 oleh Abraham Lincoln dan yang menentang ekspansi perbudakan.⁶⁵

Partai Demokrat dianggap sebagai partai yang lebih liberal, dan Republik, lebih konservatif. Demokrat pada umumnya percaya bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sosial dan program ekonomi bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat *grassroots* oleh karena itu kebanyakan dari pendukung Partai Demokrat adalah kaum minoritas seperti pan Afrika-Amerika, orang Yahudi, dan orang Katolik Eropa selain itu kebanyakan pendukung Partai Demokrat merupakan wanita, hal ini dikarenakan adanya sosiasi hak asasi *new-deal* pada tahun 1950-an.⁶⁶ Berbeda dengan Partai Republik yang percaya bahwa pajak adalah hal yang penting. Partai Republik lebih menekankan para perusahaan swasta dengan keyakinan bahwa dengan adanya sektor swasta yang kuat membuat warga kurang bergantung pada pemerintah, oleh sebab itu kebanyakan pengusaha kaya, atau orang berkelas ekonomi tinggi Amerika Serikat menjadi suporter partai ini.⁶⁷

Jika dikaitkan dengan kasus yang penulis bahas, maka alasan Amerika Serikat dalam mengeluarkan kebijakan *Washington Declaration on Defense* dengan Selandia Baru adalah karena adanya dukungan dari ketiga cabang

⁶⁵ Storey, W. (2007). "*US Government and Politics*". Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd. Halaman 168-170

⁶⁶ *Ibid.* Halaman 192-195

⁶⁷ *Ibid.*

pemerintahan Amerika Serikat, dimana pada cabang eksekutif yang di jabat oleh Presiden Obama sangat menginisiasikan kebijakan tersebut. Terbukti dengan adanya ketertarikan Presiden Obama terhadap negara-negara kawasan Asia Pasifik terutama Selandia Baru. Yang kedua adanya dukungan dari anggota legislative yang pada saat itu mayoritas di jabat oleh partai demokrat , oleh sebab itu kebijakan - kebijakan yang ditentukan sangat berorientasi terhadap agenda yang dimiliki oleh Partai Demokrat. Menurut data yang penulis dapatkan dari *Democratic Party Platform 2008*, menerangkan bahwa Partai Demokrat memiliki misi untuk memperbaiki kepemimpinan AS di ranah global, salah satunya dengan menghentikan perang yang terjadi di Iraq, yang dilakukan oleh Presiden Obama pada tahun 2010 silam.⁶⁸

Selain itu dijelaskan pula jika Amerika Serikat akan mencegah persebaran nuklir dan senjata berbahan kimia lainnya dibawah pemerintahan Presiden Obama.⁶⁹ Di sini penulis melihat bahwa Partai Demokrat memiliki misi yang sama dengan Selandia Baru yang pada tahun 1984 memiliki kebijakan anti nuklir dibawah kepemimpinan David Lange yang berasal dari Partai Buruh.

Pada saat kebijakan *Washington Declaration* dibentuk, partai demokrat merupakan partai yang menginisiasi pemerintahan Amerika Serikat, sehingga agenda pemerintahan Amerika Serikat sangat berorientasi dengan visi dan misi dari Partai Demokrat. Penulis mendapatkan data bahwa Partai Demokrat dalam

⁶⁸Democratic National Convention Committee. (2008). “ *REPORT OF THE PLATFORMCOMMITTEE : RENEWING AMERICA’S PROMISE*”. Washington, DC: Democratic National Convention Committee, Inc. Halaman 28

⁶⁹ *Ibid.* Halaman 32-34

Democratic Party Platform 2008 menjelaskan jika mereka menjadikan kawasan Asia-Pasifik sebagai *Pivot to Asia* Amerika Serikat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mempererat hubungan AS dengan negara kawasan tersebut termasuk dengan Selandia Baru. Terbukti dalam *Sustaining U.S Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense* menyebutkan jika kepentingan pertahanan dan ekonomi AS mengarah ke Pasifik Barat dan Asia Timur serta daerah Samudera Hindia dan Asia Selatan. Amerika Serikat juga menginginkan untuk menjaga kestabilan keamanan wilayah Asia-Pasifik.⁷⁰

Aspek lain dalam negara demokrasi yang mempengaruhi terbentuknya suatu kebijakan luar negeri adalah adanya peran dari media. Pada awalnya peran media dipandang sebelah mata oleh Pemerintah di AS, karena dianggap media hanyalah berfungsi sebagai sarana hiburan saja. Namun keadaan tersebut berubah pada saat Perang Teluk terjadi pada tahun 1990an, dimana saluran televisi kabel Amerika Serikat CNN memberitakan secara langsung di arena perang Teluk selama 24 jam.⁷¹ Setelah siaran tersebut dikonsumsi oleh masyarakat Amerika Serikat, banyak masyarakat AS yang memprotes pemerintahan dan mendesak AS untuk menarik mundur pasukannya. Setelah inilah Pemerintah AS sadar jika media memiliki peran dalam yang sangat penting.

Jika dikaitkan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini, penulis mendapatkan fakta bahwa tidak banyak media sosial Amerika Serikat yang memberitakan isu terkait kebijakan *Washington Declaration on Defense*. Hal ini

⁷⁰ *Ibid.* Halaman 38-39

⁷¹ Bahador, Babak. (2007) *CNN Effect In Action: How the West Media Pushed the West toward War in Kosovo*, Palgrave Macmillan: USA. Halaman: 4-7

dikarenakan bahwa pada saat kebijakan ini terbentuk, Amerika Serikat sedang melaksanakan pemilihan Umum Presiden yang juga bertepatan pada bulan November, sehingga mayoritas media AS fokus dalam menyajikan berita terkait pemilihan umum. Hal ini sangat berbeda dengan pihak Selandia Baru, dimana banyak media massa yang menyajikan berita tentang kembalinya hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Selandia Baru, sehingga banyak opini publik yang terbentuk dari masyarakat Selandia Baru.

Menurut analisis penulis, terdapat alasan politis dari perspektif Pemerintahan Amerika Serikat dalam memandang Pemerintahan Selandia Baru. Dari data yang penulis dapatkan Selandia Baru merupakan negara demokrasi yang sangat stabil.⁷² Selain itu Selandia Baru memiliki kebijakan yang sangat strategis untuk menanggulangi krisis yang membuat mata uang dollar Selandia Baru bernilai kuat.⁷³ Dengan keadaan tersebut membuat Amerika mendapatkan keuntungan jika bekerja sama dengan Selandia Baru karena dengan keadaan demokrasi dan ekonomi yang stabil maka konsekuensi dalam menghadapi permasalahan juga sangat kecil.

Selandia Baru juga memiliki system pemerintahan yang membuat budaya bisnis yang cerdas sehingga perkembangan ekonomi di Selandia Baru didirikan melalui perdagangan maritim yang maju di rana global. Selandia Baru telah menjadikan dirinya sebagai bagian penting dari rantai pasokan global yang muncul di kawasan Trans-Pasifik karena mampu menghasilkan banyak produk

⁷² Miller, Raymond. (2015). *"Democracy in New Zealand"*. New Zealand: Auckland University Press. Halaman 1-2

⁷³ Bollard, Alan & Tim Ng. (2012). *Op.Cit.* Halaman 57- 58

luar biasa dan berhasil di pasar Amerika terutama produk *dairy*. Penulis juga menemukan data bahwa Selandia Baru memiliki sumber daya alam yang sangat besar, terutama minyak dan gas yang membuat Selandia Baru dikenal sebagai negara yang hijau dan peduli dengan ekosistem alam dimana sistem pemerintahannya relatif santai, namun pengawasan mereka dibatasi sedemikian rupa untuk mempromosikan proses bisnis yang efisien.⁷⁴ Dengan demikian perusahaan-perusahaan Amerika yang ingin berinvestasi di sektor energi Selandia Baru dapat memperoleh manfaat dari struktur yang santai ini. Oleh sebab itu Pemerintah Amerika Serikat memanfaatkan peluang tersebut untuk menjembatani para investor Amerika Serikat untuk berinvestasi ke Selandia Baru.

⁷⁴ Echetebe, Norris. (2013). "*US Interest in New Zealand*". **Diakses pada tanggal** 4 Mei 2018 **dari:** <http://nz-uslegal.co.nz/news-events-and-publications/publications/us-interests-in-new-zealand/>

5.3 Actor Leadership

Kegley melihat individu sebagai *Political efficacy* yang berarti bahwa individu atau *decision maker* merupakan aktor penting atau *key actor* dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini dikarenakan suatu kebijakan yang dihasilkan oleh suatu negara sangat bergantung dan memiliki pada nilai atau keyakinan yang dianut oleh *key actor* tersebut. Keyakinan ini dapat berupa latar belakang pendidikan, agama dan kepercayaan tentang sejarah yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku *key actor* atau pemimpin.

Dalam isu yang penulis angkat, kebijakan *Washington Declaration on Defense* dibentuk pada saat Presiden Obama menjabat, oleh karena itu Obama memiliki pengaruh yang sangat kuat dibalik terbentuknya kebijakan tersebut. Presiden Obama merupakan presiden Amerika Serikat yang ke 44. Ia merupakan presiden Afrika-Amerika pertama, Obama lahir pada tanggal 4 Agustus 1961 di Hawaii. Presiden Obama memulai kariernya pada badan legislatif Amerika Serikat di tahun 1997 sebagai Senator Distrik Illionis, ia menjabat sebagai Senator Illionis sebanyak tiga kali, pada saat menjabat sebagai senator Illionis Obama berkontribusi dalam menciptakan kredit pajak penghasilan negara yang menguntungkan kaum pekerja miskin, dan mempromosikan subsidi untuk program pendidikan usia dini.⁷⁵ dan pada tahun 2004 ia terpilih menjadi anggota Senat Rakyat Amerika Serikat, saat ia menjabat sebagai Senat Rakyat Amerika Serikat menentang kebijakan Presiden Bush untuk berperang dengan Iraq setelah

⁷⁵ Gill, Kathy.(2017). "*Political Career of Barack Obama*". ".Diakses pada tanggal 4 Juli 2018 dari: <https://www.thoughtco.co/barrack-obamas-political-career-3368167>

tragedi 9/11.⁷⁶ Oleh karenanya Obama memiliki pandangan yang berbeda dengan G. W Bush dalam menjalankan arah kebijakan luar negeri, seperti yang kita tahu pada era G. W Bush kebijakan Amerika Serikat sangat getol dalam memberantas terorisme melalui kebijakan *War on Terror* yang difokuskan pada kawasan Timur Tengah khususnya di Afghanistan dan Iraq. Hal ini dikarenakan pada tahun 2001 Amerika Serikat mengalami tragedi 9/11 dimana dua kapal terbang Al-Qaeda menabrak gedung WTC dan memakan banyak korban. Sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Obama, beliau memutuskan untuk menghentikan perang di Iraq pada tahun 2010 dan membawa pulang pasukan militernya pada tahun 2011. Obama menyatakan jika pasukan militer yang berada di Iraq dapat ditugaskan dalam isi yang lebih penting.⁷⁷

Obama telah membuat komitmen untuk menyebarkan persentase hubungan AS yang lebih besar ke Pasifik. Pada saat menjalankan pemilu Obama telah berjanji untuk memperluas produksi kapal angkatan laut dan menegaskan kembali kepemimpinan angkatan laut AS di Pasifik Selatan jika dia terpilih.⁷⁸ Akhirnya pada saat Obama terpilih, Amerika Serikat mengalami pergeseran kebijakan luar negeri, dimana lebih memfokuskan untuk menjalin hubungan dengan Negara di Kawasan Asia – Pasifik. Seperti yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya bahwa Amerika Serikat pada saat Pemerintahan Obama menjalankan geo strateginya dengan menjadikan kawasan Asia Pasifik sebagai pivot area untuk memproyeksikan kebijakan luar negerinya, hal ini dilakukan

⁷⁶ The Biography.com website." *Barack Obama Biography*". Diakses pada tanggal 4 Juli 2018 dari: <https://www.biography.com/people/barack-obama-12782369>

⁷⁷ Democratic National Convention Committee. *Op.cit*

⁷⁸ Vauhn, Bruce.(2012). *Op.Cit*.

untuk mencegah penyebaran kekuasaan China yang pada saat itu sedang berkembang di Asia Pasifik.

Alasan lain yang melatarbelakangi Amerika Serikat dalam mengeluarkan kebijakan *Washington Declaration on Defense* terhadap Selandia Baru adalah meningkatnya hubungan Amerika Serikat dengan Selandia Baru yang terjalin dengan harmonis ketika Presiden Barack Obama menjabat, bahkan Presiden Obama memiliki ketertarikan yang besar dengan Selandia Baru. Hal ini dibuktikan pada saat Presiden Obama mengadakan *Nuclear Security Summit* yang dihadiri oleh empat puluh negara yang memiliki tenaga nuklir pada tahun 2010, Obama secara pribadi mengundang Selandia Baru untuk menghadiri acara tersebut, yang mana Selandia Baru merupakan satu satunya Negara yang tidak memiliki energi nuklir yang datang pada acara tersebut. Dalam acara tersebut Obama juga memuji kepemimpinan Selandia Baru dalam menjalankan politik bebas nuklir yang stabil selama hampir tiga puluh tahun, dan menyebutkan jika Selandia baru adalah *outstanding partner of US*.⁷⁹ Penulis juga mendapatkan informasi bahwa Presiden Obama menyebutkan jika Selandia Baru merupakan “*true friends of US*” hal ini dikarenakan dukungan yang diberikan Selandia Baru yang diberikan kepada Amerika Serikat dalam menjalankan beberapa misinya seperti memberikan bantuan tenaga militer dalam misi *Operation Enduring*

⁷⁹ Watkins, Tracy.(2010). “*Obama praises New Zealand's nuclear efforts*”. Diakses pada tanggal 05 April 2018 dari: <http://www.stuff.co.nz/national/politics/3576020/Obama-praises-New-Zealands-nuclear-efforts>

Freedom pada tahun 2009, serta Selandia Baru tidak pernah memiliki perseteruan dengan Amerika Serikat ketika Obama menjabat sebagai presiden.⁸⁰

Obama mengarahkan kebijakan luar negerinya pada kawasan Asia – Pasifik, dan fokus untuk lebih mendekatkan diri dengan negara Asia-Pasifik. Melalui pernyataan menteri luar negeri AS, Hillary Clinton menyatakan bahwa AS menjadikan Asia-Pasifik sebagai pivot area untuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Bahkan Obama juga menyatakan bahwa dirinya adalah Presiden dari Asia Pasifik, saat menjalankan kunjungan kenegaraan di Jepang.⁸¹

Ketertarikan Obama dengan Selandia Baru juga ditunjukkan dengan adanya kenaikan APBN militer AS yang dialokasikan untuk kawasan Pasifik, dan adanya kerja sama berupa operasi militer antara AS dan Selandia Baru untuk melindungi samudera Pasifik yang bernama operasi Kurukuru.⁸² Obama juga memiliki visi dan misi yang sama dengan Selandia Baru, yaitu menjadikan dunia tanpa adanya energi nuklir dan menghentikan perang nuklir hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan Obama ketika ia berkampanye dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat, dan juga dituangkan dalam teks *Democratic Platform* tahun 2008.⁸³

⁸⁰ Newstalk NZ.(2012). "Obama's 'bland' speech – Hosking". Diakses pada tanggal 05 April 2018 dari: <http://www.newstalkzb.co.nz/on-air/mike-hosking-breakfast/audio/revealed-obamas-speech-hosking-labelled-bland/>

⁸¹ The Press. (2009). "Obama calls himself 'America's first Pacific president'". *NY Daily News*. Diakses pada tanggal 5 April 2018, dari: <http://www.nydailynews.com/news/world/obama-calls-america-pacific-president-hails-expanded-engagement-asia-article-1.414495>

⁸² Vaughn, Bruce.(2012). "Op.cit. Halaman 25

⁸³ Democratic Platform.Op.cit. Halaman ii

Oleh sebab itu, dikeluarkannya kebijakan *Washington Declaration on Defense* adalah salah satu upaya AS dalam meningkatkan hubungannya dengan Selandia Baru dalam berbagai bidang, termasuk kerja sama keamanan. Amerika melakukan pergeseran arah kebijakan luar negeri dan keamanan negara ke kawasan Asia – Pasifik pada masa pemerintahan Presiden Obama.⁸⁴ Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pernyataan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dalam artikel yang berjudul *America's Pacific Century* yang menyebutkan bahwa pergeseran atau redefinisi lingkungan geo strategis (*geo strategic space*) Amerika Serikat di kawasan Asia-pasifik, karena AS melihat semakin pentingnya jalur pelayaran serta keamanan di kawasan tersebut.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid.* Halaman 17

⁸⁵ *Ibid.* Halaman 16

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hubungan Amerika Serikat dan Selandia Baru terjalin baik saat Amerika Serikat membentuk aliansi yang bernama ANZUS (*Australia, New Zealand, United State*) pada tahun 1951, aliansi tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mencegah pengaruh komunisme dari para sekutu Uni Soviet seperti China yang pada saat itu tengah bangkit dalam menyebarkan paham komunisme ke negara – negara Asia dan Pasifik, selain itu tujuan lain dibentuknya ANZUS adalah untuk mengadakan perjanjian keamanan dan pertahanan antar anggota aliansi melalui kerja sama di bidang militer yang berbasis *collective defense*.

Hubungan Amerika Serikat dan Selandia Baru semakin erat ketika Selandia Baru mengirimkan dukungannya kepada Amerika Serikat dalam *proxy war* di Korea dan Vietnam. Memasuki tahun 1980-an ketika Partai Buruh menguasai Selandia Baru, hubungan antara kedua negara mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh kebijakan anti-nuklir yang digalakkan oleh Selandia Baru dimana pada saat itu Pemerintahan Selandia Baru menolak Amerika Serikat yang meminta izin agar kapal angkatan laut U.S.S. Buchanan untuk berlabuh. Dikarenakan hal tersebut, Amerika Serikat menangguhkan keanggotaan Selandia Baru dalam aliansi ANZUS, Amerika Serikat jua memutuskan kerja sama militer dengan Selandia Baru.

Selama Hampir 30 tahun Amerika Serikat dan Selandia Baru tidak membaik, namun memasuki tahun 2012, dimana Presiden Obama memerintah, Amerika Serikat membuat sejarah baru dalam membangun kembali hubungan diplomatik bersama Selandia Baru. Presiden Obama mengeluarkan kebijakan *Washington Declaration on Defense* terhadap Selandia Baru pada tahun 2012 dimana kebijakan tersebut berisikan tentang kerja sama militer yang berbeda dengan kerangka aliansi ANZUS. Hal inilah yang kemudian diteliti oleh penulis dengan dilandasi oleh konsep yang menjelaskan mengenai *foreign policy analysis*, dengan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut terbentuk yaitu *global condition*, *internal characteristics*, *actor leadership* dan *feedback*.

Dari hasil analisis dalam penelitian ini, penulis menemukan fakta bahwa dalam faktor global terdapat *global trend* yang mempengaruhi kebijakan tersebut terbentuk yakni adanya isu lingkungan dan terorisme yang menjadi perhatian global dan prioritas Amerika Serikat terlebih setelah kejadian 9/11 kelompok Al-Qaeda menyebarkan pengaruhnya di kawasan Asia-Pasifik, data yang penulis dapatkan menyebutkan bahwa pada tahun 2010 peningkatan kasus terorisme di kawasan Asia-Pasifik meningkat sebanyak 2.500 kasus. Amerika dan Selandia Baru memiliki tujuan yang sama dalam memberantas terorisme.

Dalam konteks isu lingkungan dapat dibuktikan dengan adanya bencana alam yang sangat rentan terjadi di kawasan Pasifik, dimana Amerika Serikat dan Selandia Baru merupakan negara di kawasan Tersebut. Dengan adanya kebijakan *Washington Declaration* kedua negara dapat bekerjasama dalam menanggulangi

ancaman lingkungan dan melakukan pencegahan. Selain itu kebijakan *Washington Declaration on Defense* yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat pada tahun 2010 juga dipengaruhi oleh adanya sistem polaritas internasional yang multi polar dimana terdapat banyak negara – negara yang memiliki pengaruh yang kuat sehingga mengubah pola hubungan antar negara. Oleh sebab itu dalam menjaga kepentingan nasionalnya Amerika Serikat memutuskan untuk menjalin kembali hubungannya dengan Selandia Baru tanpa ikatan aliansi sehingga dengan demikian dapat mencegah adanya intervensi dan mencegah kejadian di masa lalu terulang kembali.

Lalu juga terdapat faktor posisi geo strategi, dimana Amerika Serikat memiliki kesamaan geografis dengan Selandia Baru yaitu memiliki garis pantai yang panjang dan kedua negara juga dikelilingi oleh samudera Pasifik. Penulis menganalisis bahwa alasan dikeluarkannya kebijakan keamanan *Washington Declaration of Defense* yang dikeluarkan Amerika Serikat terhadap Selandia Baru, di latar belakang oleh alasan Amerika yang menjadikan Selandia Baru sebagai pivot area nya karena semakin pentingnya jalur maritim di kawasan Selandia Baru.

Faktor selanjutnya adalah *Internal Characteristics*, terdapat indikator kapabilitas militer bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki kapabilitas militer yang sangat kuat. Amerika Serikat juga memiliki Wilayah Komando USPACOM sehingga dengan adanya kebijakan ini dapat memudahkan urusan militer Amerika Serikat di wilayah Asia-Pasifik. Dalam indikator

ekonomi, dapat dilihat bahwa Amerika Serikat memiliki perekonomian yang kuat, dan segala jenis produksi di Amerika Serikat mengandalkan teknologi mesin yang canggih. Penulis juga mendapatkan data jika kerja sama ekonomi khususnya di bidang ekspor-impor antara kedua negara tetap baik walaupun hubungan keduanya sempat melonggar pada tahun 1984. Selain itu kondisi pemerintahan AS yang demokratis juga mempengaruhi dikeluarkannya kebijakan tersebut, karena dengan kondisi AS yang demokratis memungkinkan adanya opini yang datang dari partai politik di AS dimana pada saat itu Partai Demokrat yang menguasai kursi pemerintahan AS sehingga kebijakan AS dijalankan sesuai dengan visi dan misi dari partai tersebut.

Pada faktor individu, penulis melihat bahwa Presiden Barack Obama memiliki pengaruh dalam dikeluarkannya kebijakan tersebut. Semenjak Presiden Obama menjabat sebagai Presiden AS, arah kebijakan AS yang menjadikan kawasan Asia- Pasifik sebagai fokus kebijakan luar negeri AS, dimana sebelumnya Amerika Serikat sangat fokus ke wilayah Timur Tengah dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya keputusan Obama untuk menarik pasukan militernya pada tahun 2010 di Iraq dan menghentikan perang yang bertahun tahun terjadi.

Melalui kesimpulan yang diuraikan diatas, maka dengan demikian argumen utama penelitian ini yang berbunyi :” Alasan yang melatar belakangi Amerika Serikat dalam membuat kebijakan *Washington Declaration on Defense* dan bekerja sama dengan Selandia Baru pada tahun 2012 adalah karena adanya

empat faktor yang dijelaskan oleh Charles W. Kegley dalam konsep *Foreign Policy Analysis*” terbukti dan dapat diterima.

6.2 Saran

Saran- saran yang mungkin dapat penulis ajukan dalam kasus penelitian ini merupakan refleksi dari pandangan penulis terhadap fenomena yang menjadi pokok bahasan. Saran yang diberikan penulis merupakan akumulasi dari hambatan serta kesulitan yang dialami penulis selama melakukan penelitian ini. Hal yang mungkin sangat dekat untuk dijadikan bahan acuan dalam penelitian selanjutnya adalah cakupan konsep lain diluar konsep yang sudah digunakan penulis yaitu *foreign policy analysis* dari Kegley.

Untuk penelitian selanjutnya, perlu diadakannya penelitian lebih lanjut terkait fenomena kebijakan *Washington Declaration* tahun 2012 dengan ruang lingkup penelitian yang lebih baru, karena dalam penelitian ini penulis menggunakan ruang lingkup pada tahun 2000 hingga tahun 2012 dimana Amerika Serikat mengeluarkan Kebijakan *Washington Declaration on Defense* dibawah perintah Presiden Obama tepatnya pada tahun 2012. Hal ini ditujukan untuk melihat bagaimana jalannya penelitian ini setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, sehingga dapat dihasilkan penelitian yang lebih baik, lebih baru, serta dapat mengambil sudut pandang yang berbeda dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Asia-Pacific Economic Cooperation.” *What is Asia-Pacific Economic Cooperation?*” **Diakss pada tanggal** 3 April 2018 **pada:** <https://www.apec.org/About-Us/About-APEC>

Ayson, Robert & David Capie.(2012). “ *Part of the Pivot? The Washington Declaration and US – NZ Relations*”.

Ayson, Robert and Jock Phillips.(2012).”*United States and New Zealand - Improving relations, 1990–2011*”**Diakses pada tanggal** 18 Januari 2018 **dari:** , Te Ara - the Encyclopedia of New Zealand, <http://www.TeAra.govt.nz/en/united-states-and-new-zealand/page-4>.

Bahador, Babak.(2007) “*CNN Effect In Action: How the West Media Pushed the West toward War in Kosovo*”, Palgrave Macmillan: USA.

Bollard, Alan & Tim Ng.(2012). “*Learnings from the Global Financial Crisis*”. **Diakss pada tanggal** 3 April 2018 **pada:** <https://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Publications/Speeches/2012/4890771.pdf>.

Catalinac, Amy L.(2010).”*Why New Zealand Took Itself out of ANZUS: Obeserving Opposition for Autonomy in Asymmetric Alliance*” dalam *Foreign Policy Analysis*, Vol. 6.

Central Intelligence Agency (CIA) USA.(2006). "*National Strategy for Combatting Terrorism*". **Diakses pada tanggal** 10 Februari 2018 **dari:** <https://2001-2009.state.gov/s/ct/rls/wh/71803.htm>.

Chinkin, Christine M. (1990). "*Suspension of Treaty Relationship: The ANZUS Alliances*" Pacific Basin Law Journal.

Clark, Helen.(2002). "*NZ Navy and Air Force Join International Campaign Against Terrorism*.. **Diakses pada tanggal** 18 April 2018 **dari:** <https://www.beehive.govt.nz/release/nz-navy-and-air-force-join-international-campaign-against-terrorism>.

Cohen, Saul Bernard. (2003). *Geopolitics of The World System*". London: Bowman and Uttz Publisher.

Democratic National Convention Committee. (2008). "*REPORT OF THE PLATFORMCOMMITTEE : RENEWING AMERICA'S PROMISE*". Washington, DC: Democratic National Convention Committee, Inc.

Dewes, Kate.(1999). "*Aotearoa/New Zealand At The World Court*". Christchurch: Disarmament and Security Centre.

Dufour, Jules.(2007). "*The Worldwide Network of US Military Bases, The Global Deployment of US Military Personnel*". **Diakses pada tanggal** 25 Maret 2018, **dari:** <https://www.globalresearch.ca/the-worldwide-network-of-us-military-bases/5564>

Echetebe, Norris. (2013). *"US Interest in New Zealand"*. **Diakses pada tanggal** 4 Mei 2018 **dari:** <http://nz-uslegal.co.nz/news-events-and-publications/publications/us-interests-in-new-zealand/>

Focus Economic.(2018). *"US Economic"*. **Diakses pada tanggal** 03 April 2018 **pada:** <https://www.focus-economics.com/countries/united-states>

Gaddis, John Lewis. (1972). *"The United States and the Origins of the Cold War"*. New York: Columbia University Press.

Globalfirepower .(2017). *"United States Military Strength"*. **Diakses pada tanggal** 25 Maret 2018, **dari:** https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=united-states-of-america

Global Research. (2013). *U.S. War On Terror Has INCREASED Terrorism.*

Greener, Peter.(2009). *"Timing is Everything: The politics and Processes of New Zealand Defence Acquisition decision making"* Canberra: Australia National University Press.

Green Peace.(2006). *"History Of The Anti Nuclear Movement In New Zealand"* **Diakses pada tanggal** 25 April 2018 **dari** <http://www.greenpeace.org/new-zealand/en/campaigns/nuclear/nuclear-free-nz/anti-nuke-history-NZ/>.

Index of Economic Freedom. (2018). *United States Economy: Population, GDP, Unemployment, Inflation, Spending*. **Diakses pada tanggal** 28 Maret 2018 **dari :** <https://www.heritage.org/index/country/unitedstates>

Jillson, C. (2008). *American Government, Political Change and Institutional Development* (4th ed.). New York: Taylor & Francis Group, LLC..Halaman 31

Kegley, William Charles & Shannon L. Blanton. (2010). *“World Politics Trend and Transformation”*. Canada: Cengage Brain.

Landler, M. (2018). *U.S. Troops to Leave Iraq by Year's End, Obama Says*.

Diakses pada tanggal 20 Maret 2018 **dari:** Nytimes.com. **tersedia di:** <http://www.nytimes.com/2011/10/22/world/middleeast/president-obama-announces-end-of-war-in-iraq.html>.

Militaryfactory (2018). *“United States Aircraft List (Current and Former Types)”*.

Diakses pada tanggal 25 Maret 2018, **dari:** <https://www.militaryfactory.com/aircraft/by-country.asp?Nation=United%20States>

Miller, Raymond. (2015). *“Democracy in New Zealand”*. New Zealand: Auckland University Press

Newstalk NZ. (2012). *“Obama's 'bland' speech – Hosking”*. **Diakses pada tanggal**

05 April 2018 **dari:** <http://www.newstalkzb.co.nz/on-air/mike-hosking-breakfast/audio/revealed-obamas-speech-hosking-labelled-bland/>

Newzealand.com. (2018). *Geografi dan geologi Selandia Baru | Rotorua,*

Selandia Baru. **Diakses pada tanggal:** 19 Maret 2018 **Dari :**

<https://www.newzealand.com/id/feature/new-zealand-geography-and-geology/>.

New Zealand Foreign Affairs and Trade. "United State". **Diakss pada tanggal** 3 April 2018 **pada:** <https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/north-america/united-states-of-america/#Trade>

New Zealand Trade and Enterprise. "Investment Statistics". **Diakss pada tanggal** 3 April 2018 **pada:** <https://www.nzte.govt.nz/investment-and-funding/investment-statistics>

Norris, Zachary, D. (2012). "Why the American Election 2012 Matters in NZ". **Diakss pada tanggal** 3 April 2018 **pada:** <http://nz-uslegal.co.nz/news-events-and-publications/publications/why-the-american-election-matters-in-nz/>

Oceanservice.noaa.gov. (2018). *How long is the U.S. shoreline?*. **Diakses pada tanggal** : 16 Maret 2018 **Dari** <https://oceanservice.noaa.gov/facts/shorelength.html>.

Office of The Historian of Unites State. "The Australia, New Zealand and United States Security Treaty (ANZUS Treaty), 1951". **Diakses pada tanggal** 18 Januari 2018 **dari:** <https://history.state.gov/milestones/1945-1952/anzus>.

Office of the United States Trade Representative. "New Zealand". **Diakss pada tanggal** 3 April 2018 **pada:** <https://ustr.gov/countries-regions/southeast-asia-pacific/new-zealand>

Perwita, Anak Agung Banyu & Yayan Mochamad Yani. (2006). *"Pengantar Hubungan Internasional"*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Peters, Tom.(2009). *"US requests New Zealand SAS troops for war in Afghanistan"*. **Diakses pada tanggal:** 09 Maret 2018, **pada:** <https://www.wsws.org/en/articles/2009/04/newz-a30.html>.

Rolfe, Jim." *New Zealand Security: Alliance and Other Military Relationship, Working Paper Centre for Strategic Studies*". Victoria University of Wellington, No 10/1997.

Rolfe, J. (1997). *New Zealand's security*. Wellington, N.Z.: Centre for Strategic Studies, Victoria University of Wellington.

ROB.(2010) *"The Wellington Declaration"* **Diakses pada tanggal** 05 April 2018 **dari:** <https://thestandard.org.nz/the-wellington-declaration/>

Soddu, Marco." *Truman Administration's Containment Policy: In Light of the French Return to Indochina*. Foreign Journal.

Storey, W. (2007). *"US Government and Politics"*. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.

Stratfor. (2018). *The Geopolitics of the United States, Part 1: The Inevitable Empire*. **Diakses pada tanggal :** 16 Maret 2018 **Dari** <https://worldview.stratfor.com/article/geopolitics-united-states-part-1-inevitable-empire>.

Suskind,Ron.(2009).”Faith, Certainty and the Presidency of Brarack Obama.”.

Diakses pada tanggal 12 April 2017 dari:

<http://www.nytimes.com/2004/10/17/magazine/faith-certainty-and-the-presidency-of-barack-obama.html>

Terrorism Suppression Amendment Act 2007

The Heritage Foundation.(2017).”*Index of Military Stength, Global Assessment*”.

Heritage.org.

The Heritage Foundation.(2018).”*Index of Economic Freedom, United States*”.

The Press. (2009). “*Obama calls himself 'America's first Pacific president'*”. NY

Daily News. **Diakses pada tanggal 5 April 2018, dari:**

<http://www.nydailynews.com/news/world/obama-calls-america-pacific-president-hails-expanded-engagement-asia-article-1.414495>

The Press. (2009). “*Obama calls himself 'America's first Pacific president'*”. NY

Daily News. **Diakses pada tanggal 5 April 2018, dari:**

<http://www.nydailynews.com/news/world/obama-calls-america-pacific-president-hails-expanded-engagement-asia-article-1.414495>

The World Bank.”*United State*”.**Diakses pada tanggal 28 Maret 2018 pada:**

https: //data.worldbank.org/country/united-states

United State Northern Command.(2018).”*About USNORTHCOM*”. ”. **Diakses**

pada tanggal 25 March 2018, dari: [http://www.northcom.mil/About-](http://www.northcom.mil/About-USNORTHCOM/)

[USNORTHCOM/](http://www.northcom.mil/About-USNORTHCOM/)

United State Pacific Command.(2018).”*About USPACOM*”. **Diakses pada tanggal** 25 March 2018, **dari:** <http://www.pacom.mil/About-USPACOM/>

United State Southern Command.(2018).”*About Us*”. **Diakses pada tanggal** 25 March 2018, **dari:** <http://www.southcom.mil/About/>

United State Central Command. (2018). “*Mission, Vision & Strategic Approach*.” **Diakses pada tanggal** 25 March 2018, **dari:** 25 March 2018, from <http://www.centcom.mil/ABOUT-US/>

United States European Command. (2018). *Learn about EUCOM's vision and mission..* **Diakses pada tanggal** 25 March 2018, **dari:** <http://www.eucom.mil/about>

United States Africa Command. (2018). “*About the Command*”. **Diakses pada tanggal** 25 March 2018, **dari:** <http://www.africom.mil/about-the-command>

USA.gov.”*Branches of Governmen*”.**Diakses pada tanggal** 03 April 2018 **dari:** <https://www.usa.gov/branches-of-government>

US Department of Defense.(2009). *Unified Command*.

US Office of Management and Budget. (2016). *Budget of the United State Government, Fiscal Years 2012-2017: Summary Tables (Washington DC: U.S. GovernmentPrinting Office,2011-2016)* Tabel S10, **Diakses pada tanggal** 21 Maret 2018 **dari:**

<https://www.gpo.gov.fdsys/brows/collectionGPO.action?collectionCode=BUDGET>

US-NZ Council."History of US – NZ Relations"**Diakses pada tanggal** 18 Januari 2018 **dari:** <http://usnzcouncil.org/us-nz-issues/us-nz-relations/>.

US-NZ Council.(2010). "Wellington Declaration".**Diakses pada tanggal** 05 April 2018 **dari:** <http://usnzcouncil.org/us-nz-issues/wellington-declaration/>

USPACOM. U.S. Pacific Command, (About USPACOM History).Pacom.mil.
Diakses pada tanggal 19 Maret 2018. **Dari:** <http://www.pacom.mil/About-USPACOM/History/>.

Vaughn, Bruce Robert.(2012).*The United State and New Zealand: Perspective on a Pacific Partnership*.Full Bright: New Zealand.

Verdam, Nils Knudsen. (2016). "U.S. foreign policy decision-making during the wars in Georgia and Ukraine".Swedish Defence University.

Washington Declaration on Defense 2012

Watkins, Tracy.(2010)."*Obama praises New Zealand's nuclear efforts*". **Diakses pada tanggal** 05 April 2018 **dari:** <http://www.stuff.co.nz/national/politics/3576020/Obama-praises-New-Zealands-nuclear-efforts>

Wright, T. (2018). "*Did the US military offer to build a motorway between Auckland and Wellington in 1942?*". Newshub. **Diakses pada tanggal** 27 March 2018. **Dari:** <http://www.newshub.co.nz/home/new-zealand/2018/02/did-the-us-military-offer-to-build-a-motorway-between-auckland-and-wellington-in-1942.htm>

Young, Audrey.(2012). "*Back to being friends with benefits*". **Diakses pada tanggal** 04 Mei 2017 **dari:** https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=108149

51

